

**PENGHITUNGAN BIAYA SATUAN PENDIDIKAN
SMA NEGERI 2 YOGYAKARTA TAHUN AJARAN 2014/2015**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta
untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh
Gelar Sarjana Pendidikan



Oleh :
ANASTASIA IDE CAHYANINGRUM
11403244064

**JURUSAN PENDIDIKAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2015**

**PENGHITUNGAN BIAYA SATUAN PENDIDIKAN
SMA NEGERI 2 YOGYAKARTA TAHUN AJARAN 2014/2015**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta
untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh
Gelar Sarjana Pendidikan



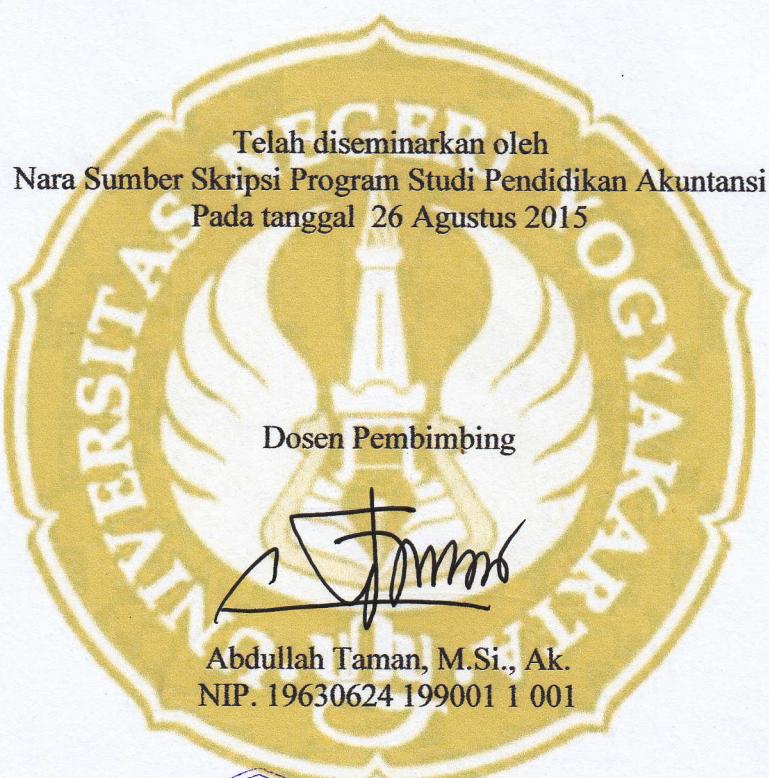
Oleh :
ANASTASIA IDE CAHYANINGRUM
11403244064

**JURUSAN PENDIDIKAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2015**

**PENGHITUNGAN BIAYA SATUAN PENDIDIKAN
SMA NEGERI 2 YOGYAKARTA TAHUN AJARAN 2014/2015**

PROPOSAL SKRIPSI

Oleh :
Anastasia Ide Cahyaningrum
11403244064



Skripsi yang berjudul :

**“PENGHITUNGAN BIAYA SATUAN PENDIDIKAN SMA NEGERI 2
YOGYAKARTA TAHUN AJARAN 2014/2015”**

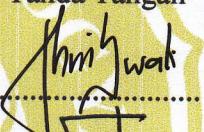
Yang disusun oleh :

ANASTASIA IDE CAHYANINGRUM

11403244064

telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji pada tanggal 12 November 2015 dan
dinyatakan lulus

DEWAN PENGUJI

Nama	Kedudukan	Tanda Tangan	Tanggal
RR. Indah Mustikawati, S.E.Akt., M.Si.	Ketua Pengaji		16 - 11 - 2015
Abdullah Taman, S.E.Akt., M.Si.	Sekretaris Pengaji		16 - 11 - 2015
Dhyah Setyorini, M.Si. Akt.	Pengaji Utama		12 - 11 - 2015

Yogyakarta, 18 November 2015
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta

Dekan,

Dr. Sugiharsono, M.Si

NIP. 19550328 198303 1 002



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anastasia Ide Cahyaningrum

NIM : 11403244064

Program Studi : Pendidikan Akuntansi

Fakultas : Ekonomi

Judul Tugas Akhir : **PENGHITUNGAN BIAYA SATUAN PENDIDIKAN
SMA NEGERI 2 YOGYAKARTA TAHUN AJARAN
2014/2015**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penelitian skripsi yang saya buat ini merupakan hasil karya saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya, tidak terdapat karya/pendapat yang ditulis/diterbitkan orang lain, kecuali sebagai acuan/kutipan dengan tata tulis karya ilmiah yang lazim.

Dengan demikian pernyataan ini dibuat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 15 Oktober 2015

Penulis,



Anastasia Ide Cahyaningrum
NIM. 11403244064

MOTTO DAN PERSEMPAHAN

MOTTO

Kebaikan yang engkau lakukan hari ini mungkin saja besok sudah dilupakan orang,
bagaimanapun berbuat baiklah (Mother Teresa)

“Dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung” (Arief budi S. – Gubernur BI DIY)

PERSEMPAHAN

Puji Tuhan kepada Tuhan yang Maha Esa, berkat kasih-Nya saya dapat
menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Karya sederhana ini ku persembahkan untuk kedua orang tua ku yang selalu
mendoakan dan memberi motivasi hingga terselesaiya karya ini.

**PENGHITUNGAN BIAYA SATUAN PENDIDIKAN
SMA NEGERI 2 YOGYAKARTA TAHUN AJARAN 2014/2015**

**Oleh:
Anastasia Ide Cahyaningrum
11403244064**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya Biaya Satuan Pendidikan di SMA Negeri 2 Yogyakarta tahun ajaran 2014/2015 yang terdiri dari Biaya Operasi dan Biaya Investasi.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk mendapatkan besaran angka dan memaparkan hasil penghitungan Biaya Satuan Pendidikan per peserta didik per tahun. Subjek penelitian adalah Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, dan Bendahara Sekolah SMA Negeri 2 Yogyakarta. Objek penelitian ini adalah Biaya Satuan Pendidikan yang meliputi Biaya Operasi dan Biaya Investasi. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumentasi dan wawancara. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif dengan bantuan program *microsoft excel*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Sumber pendanaan di SMA Negeri 2 Yogyakarta berasal dari APBN sebesar Rp858.000.000,00 (20%); APBD 1 sebesar Rp254.868.500,00 (6%); APBD 2 sebesar Rp1.884.205.000,00 (43%); dan Komite Sekolah sebesar Rp1.367.986.750,00 (31%); (2) Biaya Operasi per peserta didik di SMA Negeri 2 Yogyakarta tahun ajaran 2014/2015 adalah Rp4.349.461,83; (3) Biaya Investasi per peserta didik di SMA Negeri 2 Yogyakarta tahun ajaran 2014/2015 adalah Rp738.020,98; (4) Biaya Satuan Pendidikan per peserta didik di SMA Negeri 2 Yogyakarta adalah Rp5.087.482,81.

Kata Kunci: Biaya Operasi, Biaya Investasi, Biaya Satuan Pendidikan

**COUNTING OF EDUCATION UNIT COST STATE HIGH SCHOOL 2
YOGYAKARTA IN THE ACADEMIC YEAR 2014/2015**

By:
Anastasia Ide Cahyaningrum
11403244064

ABSTRACT

This research aims to determine the amount of education unit cost in State High School 2 Yogyakarta in the academic year 2014/2015 that consists of Operational Cost and investment Cost.

This research applied the descriptive quantitative approaches. Quantitative approach used to obtain the amount of numbers and presents the results of the counting Education Unit Cost for each student and each year. The subjects Of this study were Principal, Vice Principal, and the Treasurer of State High School 2 Yogyakarta. The object of this study was Education Unit Cost covering Operational Cost and Invesment Cost. The data were collected by documentation and interviews. The collected data were analyzed descriptively using Microsoft Excel program.

The result showed that (1) Sources of funding in State High School 2 Yogyakarta in the academic year 2014/2015 from State Budget is Rp858,000,000.00 (20%); Regional Budgets 1 (Daerah Istimewa Yogyakarta) is Rp254,868,500.00 (6%); Regional Budget 2 is Rp1,884,205,000.00 (43%); and the School Committee is Rp1.367.986.750,00 (31%); (2) Operational Costs for each student in State High School 2 Yogyakarta in the academic year 2014/2015 is Rp4.349.461,83; (3) Investment Costs for each student is Rp738,020.98; (4) Education Unit Cost for each student is Rp5.087.482,81.

Key words: Operational Cost, Investment Cost, Education Unit Cost

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Maha Kasih atas berkat penyertaan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi yang berjudul “Penghitungan Biaya Satuan Pendidikan SMA Negeri 2 Yogyakarta Tahun Ajaran 2014/2015” dengan lancar. Terselesainya Tugas Akhir Skripsi tidak terlepas dari adalanya bimbingan, pengarahan, dan bantuan-bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.Pd., M.A., Rektor Universitas Negeri Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan menempuh pendidikan di Universitas Negeri Yogyakarta.
2. Dr. Sugiharsono, M.Si., Dekan Fakultas Ekonomi UNY yang telah memberikan ijin penelitian untuk keperluan penyusunan skripsi.
3. Abdullah Taman, M.Si., Ak., dosen pembimbing yang telah membimbing selama menyusun skripsi.
4. Diana Rahmawati, M.Si., dosen pembimbing akademik yang telah banyak membantu pada masa studi.
5. Dhyah Setyorini, M.Si., Ak., dosen nara sumber Tugas Akhir Skripsi yang telah memberikan ilmu dan masukan.
6. Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Yogyakarta yang telah memberikan ijin penelitian dan membimbing selama pengumpulan data sampai pengelohan data skripsi ini.

7. Sahabat-sahabat saya yang telah membantu dan memberikan semangat selama penyusunan karya ini.
8. Teman-teman Pendidikan Akuntansi 2011 B yang selalu memberikan dukungan dan motivasi.
9. Keluarga dalam organisasi IKMK UNY, BEM FE UNY, GENBI, GRKAS, Keluarga Cemara yang telah memberikan pengalaman dan ilmu di luar bangku kuliah.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah memberikan semangat dan bantuan selama penyusunan skripsi ini.

Penulis mohon maaf apabila selama proses studi hingga selesaiya Tugas Akhir Skripsi melakukan kesalahan. Akhirnya harapan peneliti mudah-mudahan apa yang terkadung di dalam penelitian ini bermanfaat bagi semua pihak.

Yogyakarta, 15 Oktober 2015

Penulis,



Anastasia Ide Cahyaningrum

NIM. 11403244064

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO DAN HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Pembatasan Masalah	8
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian.....	8
F. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II. KAJIAN PUSTAKA DAN PERTANYAAN PENELITIAN	10
A. Kajian Teori.....	10
1. Pembiayaan Pendidikan.....	10
2. Karakteristik Pembiayaan Pendidikan.....	11
3. Biaya Pendidikan.....	12
4. Klasifikasi Biaya Pendidikan	13
5. Sumber-sumber Pendanaan Pendidikan	16
6. Penghitungan Biaya Pendidikan.....	18
7. Biaya Satuan Pendidikan (<i>Unit Cost</i>).....	23
8. Biaya Operasi Pendidikan	24
9. Biaya Investasi Pendidikan.....	32
B. Penelitian Relevan	33
C. Kerangka Berpikir	35
D. Pertanyaan Penelitian	36
BAB III. METODE PENELITIAN	38
A. Desain Penelitian	38
B. Tempat dan Waktu Penelitian	38
C. Subjek dan Objek Penelitian	38
D. Definisi Operasional Variabel	39
E. Teknik Pengumpulan Data	40
F. Instrumen Penelitian.....	40

G.	Teknik Analisis Data	41
BAB IV.	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A.	Data Umum SMA Negeri 2 Yogyakarta	43
B.	Data Khusus SMA Negeri 2 Yogyakarta	49
1.	Sumber-sumber Pendanaan Pendidikan SMA Negeri 2 Yogyakarta	49
2.	Biaya Operasi	50
3.	Biaya Investasi.....	51
4.	Biaya Satuan Pendidikan.....	51
C.	Pembahasan	52
D.	Keterbatasan Penelitian	59
BAB V.	SIMPULAN DAN SARAN	60
A.	Simpulan.....	60
B.	Saran	60
DAFTAR PUSTAKA		62
LAMPIRAN.....		64

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Kisi-kisi Pedoman Wawancara.....	41
2. Kisi-Kisi Penghitungan Biaya Satuan Pendidikan Per Peserta Didik	42
3. Rombongan Belajar SMA Negeri 2 Yogyakarta Tahun Ajaran 2014/2015	45
4. Rincian Peserta Didik SMA Negeri 2 Yogyakarta Tahun Ajaran 2014/2015	46
5. Keadaan Tanah dan Bangunan di SMA Negeri 2 Yogyakarta.....	47
6. Sarana dan Prasarana di SMA Negeri 2 Yogyakarta Tahun Ajaran 2014/2015	48
7. Keadaan Sumber-Sumber Pendanaan Pendidikan SMA Negeri 2 Yogyakarta Tahun Ajaran 2014/2015	49
8. Rekapitulasi Biaya Operasi SMA Negeri 2 Yogyakarta Tahun Ajaran 2014/2015	50
9. Rekapitulasi Biaya Investasi SMA Negeri 2 Yogyakarta Tahun Ajaran 2014/2015	51
10. Penghitungan Biaya Satuan Pendidikan SMA Negeri 2 Yogyakarta Tahun Ajaran 2014/2015	51
11. Persentase Sumber-Sumber Pendanaan Pendidikan SMA Negeri 2 Yogyakarta Tahun Ajaran 2014/2015	52
12. Persentase Jenis Dana dari Sumber Pendanaan Pendidikan SMA Negeri 2 Yogyakarta Tahun Ajaran 2014/2015	54
13. Persentase Biaya Operasi SMA Negeri 2 Yogyakarta Tahun Ajaran 2014/2015	55
14. Alokasi Biaya Operasi Personalia SMA Negeri 2 Yogyakarta Tahun Ajaran 2014/2015	56
15. Persentase Biaya Investasi SMA Negeri 2 Yogyakarta Tahun Ajaran 2014/2015	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Berpikir	36
2. Grafik Jumlah Peserta Didik di SMA Negeri 2 Yogyakarta Tahun Ajaran 2014/2015	47
3. Grafik perbandingan Rencana Anggaran dan Realisasi Anggaran Tahun Ajaran 2014/2015	52
4. Grafik Persentase Sumber-Sumber Pendanaan Pendidikan SMA Negeri 2 Yogyakarta Tahun Ajaran 2014/2015.....	53
5. Grafik Persentase Biaya Operasi SMA Negeri 2 Yogyakarta Tahun Ajaran 2014/2015	55
6. Persentase Biaya Investasi SMA Negeri 2 Yogyakarta tahun ajaran 2014/2015	58

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran		Halaman
1.	Rekapitulasi RAPBS SMA Negeri 2 Yogyakarta Tahun Ajaran 2014/2015	64
2.	Anggaran dan Realisasi Dana Komite Sekolah SMA Negeri 2 Yogyakarta Tahun Ajaran 2014/2015	70
3.	Daftar Peserta Didik SMA Negeri 2 Yogyakarta Tahun Ajaran 2014/2015	75
4.	Hasil Wawancara	103
5.	Surat-Surat	106

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan investasi masa depan dan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas kehidupan manusia. Melalui pendidikan, kecerdasan dan keterampilan, manusia dapat menghadapi dinamika kehidupan yang semakin kompleks. Dalam skala makro, pendidikan merupakan indikator kualitas sumber daya manusia. Semakin baik pendidikan, maka semakin baik pula kualitas sumber daya manusia. Begitu pentingnya pendidikan untuk meningkatkan sumber daya manusia, maka pemerintah menjadikan pendidikan sebagai hak dasar setiap warga negara Indonesia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia maka pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, sebagai tindak lanjut dari apa yang diamanatkan oleh Pasal 31 UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran

pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional, pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Upaya menciptakan pendidikan yang memadai di suatu sekolah telah dijabarkan ke dalam sejumlah peraturan pemerintah, salah satunya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 menetapkan tentang Standar Nasional Pendidikan. Dalam peraturan pemerintah ini dijelaskan bahwa Standar Nasional Pendidikan meliputi: standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Beberapa indikator yang menentukan kualitas mutu sekolah sebagai *input* antara lain siswa, kurikulum, sarana prasarana, biaya, pengelolaan, dan lingkungan. Biaya pendidikan menjadi salah satu indikator terpenting yang mempengaruhi kualitas mutu sekolah.

Biaya pendidikan digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan melancarkan kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pendidikan. Biaya pendidikan adalah suatu pengorbanan yang harus dikeluarkan untuk penyelenggaraan pendidikan agar menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Menurut Nanang Fattah (2008) biaya pendidikan ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain: besar kecilnya institusi pendidikan, jumlah siswa,

tingkat gaji tenaga kependidikan, tingkat pertumbuhan penduduk, dan perubahan kebijakan. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 62 menyebutkan Pembiayaan Pendidikan terdiri atas Biaya Investasi, Biaya Operasi, dan Biaya Personal.

Sumber pendanaan untuk memenuhi biaya pendidikan berasal dari beberapa pihak. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 46 menyatakan bahwa Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat. Selanjutnya akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah, salah satunya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. Itu artinya pendanaan pendidikan tidak cukup ditanggung oleh satu sumber, seperti pemerintah pusat saja, namun perlu partisipasi dari pemerintah daerah dan masyarakat.

Sebagai salah satu sumber pendanaan dan pelaksana Program Wajib Belajar, pemerintah meluncurkan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagai upaya percepatan penuntasan Program Wajib Belajar 9 Tahun dan pemberian kesempatan siswa miskin memperoleh pendidikan di sekolah pada jenjang pendidikan dasar. Sedangkan pemerintah daerah mengeluarkan bantuan operasional sekolah yang disebut Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) yang digunakan untuk kegiatan operasional pembelajaran. BOS dan BOSDA hanya diberikan kepada satuan pendidikan dasar meliputi TK, SD, dan SMP namun belum diberikan kepada satuan pendidikan tingkat SMA sederajat, seperti yang tertuang dalam Perwal Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2013.

Setiap daerah mempunyai otonomi daerah berkaitan dengan pendanaan pendidikan. Kota Yogyakarta telah mengeluarkan keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 580/KEP/2011 yang menyatakan bahwa jenjang pendidikan SMA mendapatkan biaya operasional yang disebut Biaya Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), karena jenjang pendidikan SMA belum mendapatkan program BOS dari pemerintah. Berbeda dengan pendidikan dasar yang tidak boleh memungut biaya pendidikan dari peserta didik, jenjang pendidikan SMA boleh memungut biaya pendidikan dengan ketentuan tertentu, karena dana BOSP belum mampu memenuhi semua biaya pendidikan tingkat SMA.

SMA Negeri 2 Yogyakarta merupakan salah satu sekolah yang mendapatkan dana pendidikan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang diambil dari APBN dan APBD. Berdasarkan hasil wawancara dengan Wakil Kepala SMA Negeri 2 Yogyakarta, dana dari Pemerintah tersebut belum mampu memenuhi semua biaya pendidikan. Maka pihak sekolah perlu memungut biaya sebesar Rp40.000,00 (Empat Puluh Ribu Rupiah) kepada setiap peserta didik. Selain itu, disampaikan juga bahwa sekolah harus mengurangi beberapa kegiatan agar kegiatan yang dilaksanakan di sekolah sesuai dengan ketentuan Dinas Pendidikan.

Sama halnya dengan Kepala SMA Negeri 3 Yogyakarta (wawancara, 9 Februari 2013) yang mengemukakan bahwa sejak sekolah tidak diperbolehkan untuk melakukan pungutan lebih dari Rp40.000,00 kepada siswa maka sekolah harus membuat skala prioritas dalam merencanakan kegiatannya. Kondisi

demikian membuat sekolah harus mengurangi kegiatan yang jauh dari fungsi akademik, terutama pada kegiatan pendukung ataupun kegiatan penunjang. Itu artinya, masalah yang timbul karena program BOSPA tidak hanya dirasakan oleh satu sekolah saja namun juga dirasakan oleh beberapa sekolah.

Program dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah menimbulkan pro-kontra dari masyarakat. Salah satu masalah yang muncul adalah kecemburuan sosial dari masyarakat atau orang tua wali yang mempertanyakan tentang BOSDA dan pembebasan biaya pendidikan hanya untuk pendidikan dasar dan tidak untuk jenjang SMA. Disisi lain ada masyarakat yang menganggap upaya pemerintah memberikan akses bagi setiap warga negara Indonesia untuk dapat memperoleh pendidikan dasar melalui Program BOS sebagai sekolah gratis. Seperti yang dikatakan salah satu wali murid SMA Negeri 2 Yogyakarta, dalam wawancara singkat beliau memberikan pendapat bahwa sekolah gratis dan biaya SPP rendah justru menimbulkan penafsiran yang mengarah pada penurunan kualitas pendidikan.

Dalam hal pembiayaan pendidikan, Nanang Fattah (2001) menjelaskan bahwa biaya yang rendah berpengaruh terhadap kualitas pendidikan di sekolah dan proses belajar-mengajar serta kualitas *outcomes* yang dihasilkan. Artinya ada korelasi yang positif antara besarnya biaya pendidikan terhadap peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Oleh karena itu satuan pendidikan memerlukan perencanaan biaya pendidikan yang tepat antara sumber dana dan pengeluarannya. Dengan informasi perencanaan biaya pendidikan dapat diketahui

akurasi di dalam penetapan biaya penyelenggaraan pendidikan, maka dari itu akuntabilitas keuangan suatu lembaga pendidikan menjadi sebuah tuntutan. Sekolah dapat mengkomunikasikan secara transparan dan terbatas atas biaya penyelenggaraan pendidikan sehingga masyarakat dapat menilai sekaligus mengevaluasi kinerja keuangan sekolah tersebut.

Lembaga pendidikan dan masyarakat merupakan dua jenis lingkungan yang berbeda namun keduanya tidak dapat dipisahkan bahkan saling membutuhkan dalam pertumbuhan serta perkembangannya. Sekolah tidak bisa menjadi lembaga yang eksklusif dan memisahkan diri dari lingkungan masyarakat, dengan semakin tinggi tingkat perhatian masyarakat terhadap lembaga pendidikan terkait maka akan semakin besar pula peluang sekolah untuk mempertahankan eksistensinya demikian sebaliknya. Hubungan sekolah dan masyarakat diharapkan mampu menumbuhkan kreativitas serta dinamika kedua belah pihak sehingga hubungan tersebut bersifat aktif dan dinamis, sehingga pada gilirannya prinsip transparasi yang dilakukan oleh keduanya akan mengarah pada profesionalitas pengelolaan kelembagaan yang senantiasa membawa kearah perubahan yang inovatif sehingga akan berdampak pada peningkatan mutu kelembagaan secara total.

Selain itu, sekolah perlu memperhitungkan efektivitas biaya per peserta didik (*unit cost*) termasuk Biaya Operasi dan Biaya Investasi. Informasi biaya tersebut dapat digunakan sebagai ukuran apakah masukan yang dikorbankan memiliki nilai ekonomis yang lebih rendah daripada nilai keluaranya atau

sebaliknya. Penghitungan biaya pendidikan dapat memperlihatkan berapa biaya yang ditanggung oleh masing-masing peserta didik, baik yang bersumber dari pemerintah sebagai bantuan operasional untuk peserta didik maupun dari personal. Maka dari itu perlu penghitungan secara rinci dan transparan mengenai biaya pendidikan sebagai informasi untuk mengambil keputusan. Penghitungan yang transparan juga dapat menjelaskan kepada masyarakat berapa biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat untuk ikut membantu terlaksananya pendidikan yang berkualitas di Indonesia.

Atas dasar latar belakang masalah tersebut penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Penghitungan Biaya Satuan Pendidikan SMA Negeri 2 Yogyakarta Tahun Ajaran 2014/2015”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sasaran pembebasan biaya sekolah hanya untuk pendidikan dasar, sedangkan untuk tingkat SMA masih diberlakukan pemungutan biaya pendidikan.
2. Dana pemerintah belum mampu mencukupi seluruh biaya pendidikan di SMA Negeri 2 Yogyakarta.
3. SMA Negeri 2 Yogyakarta mengurangi kegiatan di sekolah karena kegiatan tersebut tidak tercantum dalam anggaran yang diberikan oleh pemerintah.

4. Kekhawatiran dari masyarakat akan penurunan kualitas pendidikan karena biaya pendidikan yang murah.
5. Masyarakat belum mengetahui alokasi dari Total Biaya yang diperlukan SMA Negeri 2 Yogyakarta untuk membiayai pendidikan satu tahun.
6. Masyarakat belum mengetahui Biaya Satuan Pendidikan (*unit cost*) per peserta didik per tahun SMA Negeri 2 Yogyakarta.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, penelitian ini dibatasi pada permasalahan masyarakat belum mengetahui total biaya pendidikan dan biaya satuan pendidikan per peserta didik di SMA Negeri 2 Yogyakarta.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan pembatasan masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Berapakah Biaya Satuan Pendidikan per peserta didik di SMA Negeri 2 Yogyakarta tahun ajaran 2014/2015? ”.

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besar Biaya Satuan Pendidikan per peserta didik di SMA Negeri 2 Yogyakarta tahun ajaran 2014/2015.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran berupa pengetahuan, data atau informasi yang memadai serta untuk menambah referensi mengenai masalah yang diteliti yaitu Biaya Satuan Pendidikan, dan untuk dapat mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai hal yang serupa.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Kepala SMA Negeri 2 Yogyakarta, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan untuk menetapkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) sehingga kegiatan dan manajemen sekolah dapat berjalan dengan baik melalui kerjasama antara masyarakat dan sekolah.
- b. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan ukuran anggaran pendidikan yang harus disiapkan oleh masing-masing orangtua dan sebagai sumber informasi yang transparan dan *accountable*.
- c. Bagi penelitian selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dan menambah referensi untuk menghitung Biaya Satuan Pendidikan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN PERTANYAAN PENELITIAN

A. Kajian Teori

1. Pembiayaan Pendidikan

Menurut Matin (2014: 4) pembiayaan pendidikan adalah suatu proses mengalokasikan sumber-sumber pada kegiatan operasional pendidikan atau dalam proses belajar mengajar di kelas. Mulyono (2010: 78) mengemukakan bahwa pembiayaan pendidikan adalah sebuah analisis terhadap sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran yang digunakan secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan pendidikan.

Menurut Indra Bastian (2007: 160) “pembiayaan pendidikan adalah upaya pengumpulan dana untuk membiayai operasional dan pengembangan sektor pendidikan”, sedangkan Muljani (2011: 1) membedakan antara pembiayaan dan pendanaan, yaitu pembiayaan lebih menyangkut persoalan estimasi dan perencanaan kebutuhan biaya yang diperlukan untuk mendukung proses pendidikan, dan pendanaan lebih berkaitan dengan persoalan bagaimana, siapa, dan seberapa mendanai pendidikan.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan pembiayaan pendidikan adalah proses analisis kebutuhan biaya pendidikan dan pengalokasian sumber-sumber dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dan mendukung proses pendidikan.

2. Karakteristik Pembiayaan Pendidikan

Suharsimi (2008: 322) menyatakan bahwa karakteristik pembiayaan pendidikan sebagai berikut:

- a. Biaya pendidikan selalu naik. Penghitungan pembiayaan dinyatakan dalam biaya satuan terkecil (*unit cost*), menurut luasnya faktor yang diperhitungkan, *unit cost* dapat dibagi menjadi:
 - 1) *Unit cost* lengkap, yaitu penghitungan *Unit cost* berdasarkan fasilitas yang dikeluarkan. Dihitung dari keseluruhan program baik yang tergolong dalam kurikulum maupun ekstra kurikuler.
 - 2) *Unit cost* setengah lengkap, yaitu hanya memperhitungkan biaya kebutuhan bahan dan alat yang berangsur habis walaupun jangka waktunya berbeda. *Unit cost* setengah lengkap ini masih menghitung biaya personil dan barang-barang yang secara tidak langsung berhubungan dengan siswa.
 - 3) *Unit cost* sempit, yaitu *Unit cost* yang diperoleh hanya dengan memperhitungkan biaya yang langsung berhubungan dengan kegiatan belajar mengajar.
- b. Biaya terbesar dalam pelaksanaan pendidikan adalah biaya tenaga kerja.
- c. *Unit cost* pendidikan akan naik sebanding dengan tingkat sekolah dan dipengaruhi oleh jenis lembaga pendidikan.
- d. Komponen yang dibiayai dalam sistem pendidikan hampir sama dari tahun ke tahun.

Indra Bastian (2007: 160) menyatakan bahwa peranan pembiayaan pendidikan terlihat dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) agar sejajar dengan manusia lain, baik secara regional (otonomi daerah), nasional, maupun internasional (global). SDM dianggap lebih bernilai apabila sikap, perilaku, wawasan, kemampuan, keahlian, serta keterampilannya sesuai dengan kebutuhan berbagai bidang dan sektor.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa karakteristik pembiayaan pendidikan antara lain biaya pendidikan akan selalu naik sebanding dengan tingkat sekolah atau jenjang pendidikan, dan pembiayaan pendidikan digunakan untuk pengembangan sumber daya manusia.

3. Biaya Pendidikan

Menurut Muljani (2011: 27-28) ada tiga konsep yang menjelaskan pengertian biaya pendidikan. Konsep pertama merujuk kepada segala pengeluaran yang dipergunakan untuk membiayai pendidikan yang dapat diwujudkan dengan nilai rupiah. Konsep kedua adalah seluruh komponen masukan pendidikan baik berupa moneter (uang) maupun non-moneter. Dalam konsep ketiga, seluruh sumber daya diperhitungkan baik yang berupa moneter maupun non-moneter, yang secara langsung maupun tidak langsung diperlukan untuk menunjang proses pendidikan.

Indra Bastian (2007: 137) menyatakan bahwa biaya pendidikan adalah suatu bentuk pengorbanan ekonomis yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara umum, terutama mencetak kualitas pribadi lulusan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yayasan, maupun entitas sekolah itu sendiri, sedangkan menurut Harsono (2007: 9) biaya pendidikan adalah semua pengeluaran yang memiliki kaitan langsung dengan proses pendidikan. Pengeluaran yang tidak memiliki kaitan langsung dengan proses pendidikan disebut sebagai pemborosan, atau pengeluaran yang semestinya dapat dicegah.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa biaya pendidikan adalah seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, orang tua, dan peserta didik baik berupa moneter (uang) maupun non-moneter untuk membiayai kebutuhan pendidikan. Biaya pendidikan tersebut sebagai wujud pengorbanan untuk mencapai tujuan pendidikan.

4. Klasifikasi Biaya pendidikan

Matin (2013: 89) menyatakan secara garis besar biaya pendidikan untuk jalur formal terbagi menjadi dua, yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung meliputi biaya pembangunan dan biaya rutin. Biaya pembangunan diperuntukkan bagi pembangunan prasarana dan sarana pendidikan, pengadaan laboratorium dan perlengkapannya, pengadaan bengkel dan perlengkapannya, dan lain sebagainya. Biaya rutin diperuntukkan

bagi aktivitas yang berulang seperti biaya pemeliharaan, pembelian alat tulis kantor, gaji guru dan tenaga kependidikan lainnya, dan lain sebagainya. Biaya tidak langsung, dimaksudkan sebagai biaya yang hilang oleh karena siswa pada usia tersebut sudah produktif, tetapi tidak digunakan untuk bekerja mencari uang, melainkan memilih untuk mengikuti pendidikan, sehingga kehilangan kesempatan untuk memperoleh pendapatan.

Dadang Suhardan, Riduwan, & Enas (2012: 23) menyatakan bahwa jenis biaya pendidikan dapat dibagi ke dalam beberapa kategori, antara lain:

a. Biaya Langsung (*Direct Cost*)

Biaya pendidikan langsung merupakan biaya untuk membiayai proses belajar mengajar (PBM), menjaga kelancaran dan kualitas belajar serta untuk keperluan administrasi sekolah atau alat tulis kantor.

b. Biaya Tak Langsung (*indirect cost*)

Biaya ini dikeluarkan oleh keluarga atau orang yang menanggung biaya peserta didik untuk keperluan sekolah, misalnya biaya ongkos perjalanan ke sekolah, biaya makan sehari-hari, biaya kesehatan, dan biaya lainnya.

c. *Privat Cost*

Private cost merupakan keseluruhan biaya yang harus ditanggung dan dikeluarkan oleh keluarga untuk keberhasilan belajar anaknya.

d. *Social Cost*

Social cost merupakan biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat, baik perorangan maupun terorganisasi untuk membiayai keperluan pendidikan.

e. *Monetary Cost*

Monetary cost merupakan biaya yang berbentuk jasa, tenaga, dan waktu yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan pendidikan.

Menurut Indra Bastian (2007: 138) komponen penyusunan anggaran terdiri dari berbagai aktivitas yang terjadi dalam proses belajar mengajar. Dari berbagai aktivitas tersebut, biaya pelaksanaannya terdiri dari dua komponen, yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung adalah biaya yang dikeluarkan untuk membiayai proses pencapaian hasil dan tujuan suatu organisasi. Sedangkan biaya tidak langsung adalah komponen biaya penunjang atau pelengkap dari komponen biaya langsung.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 62 mengelompokkan biaya pendidikan menjadi tiga, yaitu:

- a. Biaya Investasi, meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap.
- b. Biaya Personal merupakan biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.
- c. Biaya Operasi, meliputi gaji pendidik dan tenaga kependidikan termasuk tunjangan yang melekat pada gaji, bahan atau peralatan habis pakai, serta biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan Pasal 3 menggolongkan biaya pendidikan menjadi tiga jenis, yaitu Biaya Satuan Pendidikan, Biaya Penyelenggaraan dan/atau Pengelolaan Pendidikan, dan Biaya Pribadi Peserta Didik.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan secara garis besar, biaya pendidikan dibedakan menjadi biaya langsung dan biaya tidak langsung yang dapat berupa uang maupun bukan uang. Biaya langsung adalah biaya yang berkaitan langsung dengan pendidikan dan biaya tidak langsung adalah biaya yang tidak berkaitan langsung dengan pendidikan. Biaya tersebut dapat bersifat pribadi dan sosial tergantung pihak yang mengeluarkannya. Dalam Standar Nasional Pendidikan, biaya pendidikan dikelompokkan menjadi tiga yaitu Biaya Investasi, Biaya Personal, dan Biaya Operasi.

5. Sumber-sumber Pendanaan Pendidikan

Harsono (2007: 9-10) menggolongkan sumber biaya pendidikan menjadi empat jenis, yaitu:

- a. Biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh pemerintah.
- b. Biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh masyarakat orang tua/wali.
- c. Biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh masyarakat bukan orang tua/wali siswa misalnya sponsor dari lembaga keuangan dan perusahaan.
- d. Biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh lembaga pendidikan itu sendiri.

Menurut Dedi Supriadi (2010: 5-6) sumber biaya pendidikan dibedakan beberapa tingkatan, yaitu:

- a. Pada tingkat makro (nasional) berasal dari:
 - 1) Pendapatan negara dari sektor pajak (yang beragam jenisnya)
 - 2) Pendapatan dari sektor non-pajak
 - 3) Keuntungan dari ekspor barang dan jasa
 - 4) Usaha-usaha negara lainnya, termasuk dari investasi saham pada perusahaan negara (BUMN)
 - 5) Bantuan dalam bentuk hibah (*grant*) dan pinjaman luar negeri.
- b. Pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota, anggaran untuk sektor pendidikan berasal dari dana yang diturunkan dari pemerintah pusat ditambah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dituangkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).
- c. Pada tingkat sekolah, biaya pendidikan diperoleh dari subsidi pemerintah pusat, pemerintah daerah, iuran siswa, dan masyarakat. Sedangkan pada sekolah swasta berasal dari para siswa atau yayasan.

Dadang Suhardan, Riduwan, & Enas (2012: 21) menyatakan bahwa sumber-sumber biaya pendidikan antara lain dari pemerintah seperti APBN dan APBD, sekolah (iuran siswa), masyarakat (sumbangan), dunia bisnis (perusahaan), dan hibah. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan Pasal 51 menyebutkan bahwa pendanaan pendidikan bersumber dari Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Dari pemaparan di atas disimpulkan bahwa sumber biaya pendidikan ada tiga yaitu dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Biaya pendidikan yang bersumber dari pemerintah pusat dapat berasal dari pendapatan negara dari sektor pajak, pendapatan dari sektor non-pajak, keuntungan dari ekspor barang dan jasa, dan usaha-usaha negara lainnya. Biaya pendidikan yang bersumber dari Pemerintah Daerah adalah dana yang diturunkan dari pemerintah pusat ditambah dengan Pendapatan Asli Daerah. Biaya Pendidikan yang bersumber dari masyarakat adalah biaya yang dikeluarkan oleh orang tua/wali peserta didik, masyarakat perorangan atau lembaga, perusahaan, dan lain sebagainya.

6. Penghitungan Biaya Pendidikan

Indra Bastian (2007: 137) menyatakan bahwa untuk menghitung biaya pendidikan dapat menggunakan metode *Activity Costing System* (ACS). *Activity Costing System* (ACS) adalah suatu alat penghitungan biaya dalam pendekatan ekonomi dimana biaya merupakan cerminan aktivitas yang dilakukan entitas bersangkutan, sehingga rincian biaya merupakan rincian aktivitas dan prasarana pendukung aktivitas yang dibutuhkan. Penghitungan yang digunakan adalah pengurangan biaya langsung dengan biaya rutin langsung, lalu dibagi dengan jumlah seluruh siswa untuk mengetahui kebutuhan langsung/riil siswa secara umum.

Dalam Panduan Penghitungan Biaya Operasional Satuan Pendidikan (2011: 7) penghitungan biaya pendidikan dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan kegiatan dan pendekatan biaya. Penghitungan biaya dengan pendekatan kegiatan dilakukan dengan menyusun/menghitung biaya berdasarkan kegiatan yang akan dilakukan, kemudian dirinci jenis biaya yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan. Dengan demikian pada kegiatan yang berbeda terdapat kemungkinan muncul jenis biaya yang sama. Sedangkan penghitungan biaya dengan pendekatan biaya dilakukan dengan menyusun/menghitung biaya yang akan dikeluarkan berdasarkan komponen biaya (dengan menggabungkan/menjumlahkan komponen biaya yang sama) untuk semua kegiatan yang dilakukan, kemudian merinci kegiatan-kegiatan yang membutuhkan biaya tersebut.

Moch. Idochi Anwar (2013: 148-157) menyatakan metode-metode yang dapat digunakan untuk menghitung jumlah biaya pendidikan yaitu:

- a. Metode pengeluaran biaya atas dasar keterangan yang diperoleh dari sumber-sumber.
 - 1) Pembiayaan

Pada metode ini, pengeluaran biaya dikumpulkan dari sumber-sumber pembiayaan pendidikan seperti sumber dari pemerintah yang terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan sumber biaya dari swasta seperti uang sekolah , sumber pribadi atau pemasukan lainnya dari orang tua.

2) Pengeluaran menurut jenis, tingkatan, dan sifat

a) Pengeluaran menurut jenis

Pada metode ini, keseluruhan pengeluaran untuk biaya pendidikan dihitung menurut jenis pengeluarannya.

b) Pengeluaran menurut tingkat

Metode pengeluaran biaya didasarkan tingkatan persekolahan seperti tingkatan Dasar, SMP, SMA.

c) Pengeluaran menurut sifat pengeluaran

(1) Jenis biaya untuk pengeluaran yang berulang

Biaya berulang terdiri dari biaya langsung untuk pengajaran dan biaya langsung penunjang untuk pengajaran.

(2) Jenis biaya untuk pengeluaran modal

Jenis biaya untuk pengeluaran modal terdiri dari pembelian dan pengembangan tanah, gedung sekolah, peralatan yang tetap dan tahan lama, pelayanan kesejahteraan dan sebagainya.

b. Metode penetapan biaya dengan memperkirakan pengeluaran berdasarkan laporan lembaga-lembaga pendidikan

Sistem Perencanaan Penyusunan Program dan Pengajaran (SP4) merupakan metode penetapan biaya pendidikan berdasarkan laporan dari lembaga pendidikan. Untuk menggunakan metode ini harus ada laporan dari lembaga pendidikan. Laporan dibuat sesuai dengan standar fungsional yang sama dan menyajikan keseluruhan biaya operasi lembaga pendidikan

tersebut. Penggunaan metode ini diawali dengan membedakan antara pengeluaran untuk pengajaran dan pengeluaran pada lembaga, misalnya pengeluaran untuk administrasi, transportasi, asrama/gedung, dan pengobatan. Kemudian pengeluaran harus dipecah-pecah menurut sifatnya, secara sederhana dapat dibedakan antara gaji, bahan dan perlengkapan, pemeliharaan, biaya operasi persediaan untuk depresiasi dan pengeluaran untuk modal. Pembedaan dan pemecahan biaya tersebut dapat disesuaikan dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan setiap lembaga pendidikan.

c. Metode penetapan biaya dengan pemilihan unit-unit

Untuk mengetahui jumlah biaya per unit maka perlu diperbandingkan antara jumlah pengeluaran biaya dengan jumlah unit. Biaya pendidikan per unit ini dapat dihitung dengan suatu asumsi bahwa hasil pendidikan itu dapat dihitung secara kuantitas yang meliputi jumlah hasil ujian dan jumlah kehadiran. Dengan mengkuantitaskan produksi pendidikan, jumlah hasil ujian dapat dihitung dengan menghitung secara sederhana jumlah anak didik yang mencapai suatu standar pendidikan dan juga dapat mempertimbangkan kapasitas produksi dalam pengertian jumlah guru, jumlah kelas, jumlah kehadiran dan jumlah peserta didik. Dengan demikian dapat dihitung biaya per lulusan, biaya menurut tingkatan pendidikan yang dicapai, biaya unit per peserta didik, biaya rata-rata kehadiran sehari-hari, biaya modal per kelas, dan biaya rata-rata per kelas.

Menurut Nanang Fattah (2004: 26-28) ada dua pendekatan dalam menentukan biaya pendidikan yaitu:

a. Pendekatan Makro

Pendekatan makro mendasarkan penghitungan pada seluruh jumlah pengeluaran pendidikan yang diterima dari berbagai sumber dana kemudian dibagi seluruh peserta didik. Faktor utama yang menentukan dalam penghitungan biaya satuan pendidikan adalah kebijakan dalam pengalokasian anggaran pendidikan di setiap negara. Biaya satuan pendidikan di setiap negara sangat bervariasi yang dipengaruhi oleh skala gaji guru dan jam terbang mengajar, penataran dan pelatihan pra jabatan, pengelompokan siswa di sekolah dan di dalam kelas, penggunaan metode dan bahan pengajar, sistem evaluasi serta supervisi pendidikan.

b. Pendekatan Mikro

Pendekatan mikro mendasarkan penghitungan biaya berdasarkan alokasi pengeluaran per komponen pendidikan yang digunakan oleh peserta didik. Pendekatan mikro menganalisis biaya pendidikan bedasarkan pengeluaran total (*total cost*) dan jumlah biaya satuan (*unit cost*) menurut jenis dan tingkat pendidikan. Biaya total merupakan gabungan biaya-biaya per komponen input pendidikan di tiap sekolah. Biaya satuan pendidikan per peserta didik merupakan biaya rata-rata yang dikeluarkan untuk melaksanakan pendidikan di sekolah per peserta didik per tahun anggaran. Biaya satuan pendidikan per peserta didik ini merupakan fungsi dari

besarnya pengeluaran sekolah serta banyaknya peserta didik di sekolah.

Dengan demikian, biaya satuan pendidikan per peserta didik ini dapat diketahui dengan jalan membagi seluruh jumlah pengeluaran sekolah setiap tahun dengan jumlah peserta didik pada tahun yang bersangkutan. Penghitungan biaya satuan pendidikan per peserta didik dapat menggunakan formula sebagai berikut:

$$S_b(s,t) = f(K(s,t) \text{ dan } M(s,t))$$

Keterangan:

S_b = biaya satuan pendidikan per peserta didik per tahun

K = jumlah seluruh pengeluaran

M = jumlah peserta didik

s = sekolah tertentu

t = tahun tertentu

7. Biaya Satuan Pendidikan (*Unit Cost*)

Nanang Fattah (2004: 24) menyatakan bahwa dalam konsep pendidikan dasar ada dua hal penting yang perlu dikaji atau dianalisis yaitu biaya pendidikan secara keseluruhan (*total cost*) dan biaya satuan per peserta didik (*unit cost*). Biaya satuan di tingkat sekolah merupakan total biaya pendidikan tingkat sekolah, baik yang bersumber dari pemerintah, orang tua, dan masyarakat yang dikeluarkan untuk membiayai pendidikan dalam satu tahun pelajaran. Biaya satuan per peserta didik merupakan ukuran yang menggambarkan seberapa besar biaya yang dialokasikan ke satuan pendidikan secara efektif untuk kepentingan peserta didik dalam menempuh pendidikan.

Menurut Jusuf Enoch (1995: 239) biaya satuan menyatakan jumlah pengeluaran yang digunakan oleh setiap peserta didik dalam tahun tertentu, baik dalam sistem pendidikan secara keseluruhan atau hanya pada tingkatan dan jenis pendidikan tertentu atau dalam sekolah tertentu saja. Menurut Mulyasa (2009: 169) “nilai *unit cost* merupakan nilai satuan biaya yang dikeluarkan untuk memberikan pelayanan kepada seorang siswa per tahun dalam suatu jenjang pendidikan. *Unit cost* memberikan tentang besar dana yang dikeluarkan dan tingkat pelayanan yang diberikan”.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa biaya satuan pendidikan dikelompokkan menjadi dua, yaitu biaya satuan pendidikan di tingkat sekolah dan biaya satuan per peserta didik. Biaya tingkat sekolah yaitu biaya pendidikan yang dikeluarkan sekolah untuk membiayai pendidikan. Biaya satuan pendidikan per peserta didik yaitu biaya pendidikan yang ditanggung oleh per peserta didik dalam menempuh pendidikan di sekolah pada tahun tertentu.

8. Biaya Operasi Pendidikan

Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 Pasal 1 menjelaskan biaya operasi pendidikan adalah bagian dari dana pendidikan yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi satuan pendidikan agar kegiatan pendidikan dapat berlangsung sesuai standar nasional pendidikan secara

teratur dan berkelanjutan. Selanjutnya pasal 62 menjelaskan biaya operasi pendidikan, meliputi:

- a. Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji.
- b. Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai.
- c. Biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.

BSNP (2006: 38-41) membagi biaya operasi ke dalam dua kelompok, yaitu biaya pegawai dan biaya bukan pegawai. Penghitungan standar Biaya Operasi didasarkan pada kebutuhan biaya minimal untuk menyelenggarakan kegiatan sekolah.

- a. Biaya pegawai

Sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2005, biaya pegawai dibagi menjadi dua kelompok, yaitu gaji pokok serta tunjangan yang melekat pada gaji dan penghasilan lain yang terdiri atas tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus dan Maslahat tambahan.

- b. Biaya bukan pegawai

Biaya bukan pegawai terdiri atas Alat Tulis Sekolah (ATS)/bahan habis pakai, rapat-rapat, transportasi/perjalanan dinas, penilaian, daya dan jasa, pemeliharaan sarana dan prasarana, pendukung pembinaan siswa.

Panduan Penghitungan Biaya Operasional Satuan Pendidikan (BOSP)

(2011: 1) menyatakan “Biaya Operasi adalah bagian dari dana pendidikan yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi satuan pendidikan agar kegiatan pendidikan dapat berlangsung sesuai standar nasional pendidikan”. Selanjutnya dalam Panduan Penghitungan BOSP (2011: 11-12) dijelaskan BOSP terdiri dari Biaya Operasi Personalia dan Biaya Operasi Nonpersonalia.

a. Biaya Operasi Personalia

Biaya Operasi Personalia tidak dirinci dalam kegiatan tetapi langsung ke dalam komponen biaya. Biaya Operasi Pesonalia meliputi gaji dan tunjangan (yang melekat pada gaji, fungsional, profesi) untuk pendidik dan tenaga kependidikan sebagai berikut:

- 1) Untuk pendidik, berupa:
 - a) Gaji pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji, untuk guru yang merangkap sebagai Kelapa Sekolah dan Wakil Kelapa Sekolah.
 - b) Gaji pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji, untuk guru lainnya (yang tidak merangkap sebagai Kelapa Sekolah).
 - c) Tunjangan fungsional, untuk guru termasuk yang merangkap sebagai Wakil Kelapa Sekolah (tidak termasuk guru yang merangkap sebagai Kelapa Sekolah).
 - d) Tunjangan profesi, untuk guru termasuk yang merangkap sebagai Kelapa Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah.

2) Untuk tenaga kependidikan, berupa:

a) Tunjangan Kelapa Sekolah (berupa tunjangan fungsional dan tunjangan lain jika ada) dan Wakil Kelapa Sekolah (jika ada)

b) Gaji pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji, untuk Laboran, Pustakawan, Teknisi Sumber Belajar, Tenaga TU, Tenaga Kebersihan.

b. Biaya Operasi Nonpersonalia adalah seluruh pengeluaran sekolah selain yang dimanfaatkan untuk kebutuhan kesejahteraan (gaji dan tunjangan) pendidik (guru) dan tenaga kependidikan di sekolah. Kebutuhan-kebutuhan operasi nonpersonalia yang sifatnya pribadi bagi pendidik (guru), tenaga kependidikan maupun siswa tidak termasuk di dalam biaya ini. Biaya Operasi Nonpersonalia dirinci dalam berbagai kegiatan sesuai dengan standar-standar nasional pendidikan.

Selain itu, dalam Panduan Penghitungan BOSP (2011: 13-14) menjelaskan bahwa komponen investasi ringan dan bantuan untuk siswa miskin dapat ditambahkan dalam penghitungan BOSP jika Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kebijakan dimana sekolah diminta bertanggung jawab untuk juga mengelola dana atas beberapa tambahan selain Biaya Operasi Personalia (khusus untuk personalia honorer yang biaya personalianya dibayar langsung oleh sekolah) dan Biaya Operasi Nonpersonalia. Komponen investasi ringan antara lain, buku teks pelajaran, alat peraga sederhana, dan investasi ringan lainnya yang diperlukan dalam

proses pembelajaran. Sedangkan bantuan untuk siswa miskin bertujuan meringankan beban biaya personal, antara lain dapat berupa bantuan dana transportasi, buku dan alat tulis, pakaian, dan uang saku.

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan mengelompokkan Biaya Operasi menjadi dua yaitu Biaya Operasi Personalia dan Biaya Operasi Nonpersonalia. Dalam Peraturan Pemerintah ini Biaya Operasi Personalia dibagi menjadi dua antara Biaya Operasi Personalia yang termasuk dalam satuan pendidikan dan Biaya Operasi Personalia yang termasuk dalam penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan.

- a. Biaya personalia satuan pendidikan, yang terdiri atas:
 - 1) Gaji pokok bagi pegawai pada satuan pendidikan;
 - 2) Tunjangan yang melekat pada gaji bagi pegawai pada satuan pendidikan;
 - 3) Tunjangan struktural bagi pejabat struktural pada satuan pendidikan;
 - 4) Tunjangan fungsional bagi pejabat fungsional di luar guru dan dosen;
 - 5) Tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan fungsional bagi guru dan dosen;
 - 6) Tunjangan profesi bagi guru dan dosen;
 - 7) Tunjangan khusus bagi guru dan dosen;
 - 8) Maslahat tambahan bagi guru dan dosen; dan
 - 9) Tunjangan kehormatan bagi dosen yang memiliki jabatan profesor atau guru besar.
- b. Biaya personalia penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan, yang terdiri atas:
 - 1) Gaji pokok;
 - 2) Tunjangan yang melekat pada gaji;
 - 3) Tunjangan struktural bagi pejabat struktural; dan
 - 4) Tunjangan fungsional bagi pejabat fungsional.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi Nonpersonalia Pasal 1 menyatakan:

“Standar biaya operasi nonpersonalia untuk SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK, SDLB, SMPLB, dan SMALB adalah standar biaya yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi nonpersonalia selama 1 (satu) tahun untuk SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK, SDLB, SMPLB, dan SMALB sebagai bagian dari keseluruhan dana pendidikan agar satuan pendidikan dapat melakukan kegiatan pendidikan secara teratur dan berkelanjutan sesuai Standar Nasional Pendidikan”.

Selanjutnya dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2009 dijelaskan Biaya Operasi Nonpersonalia meliputi:

a. Biaya alat tulis sekolah

Biaya alat tulis sekolah adalah biaya untuk pengadaan alat tulis sekolah yang dibutuhkan untuk pengelolaan sekolah dan proses belajar.

b. Biaya bahan dan alat habis pakai (BAHP)

Biaya bahan dan alat habis pakai (BAHP) adalah biaya untuk pengadaan alat dan bahan praktikum-praktikum, alat dan bahan kebersihan, alat dan bahan kesehatan dan keselamatan, tinta stempel, toner/tinta printer, dll yang habis dipakai dalam waktu satu tahun atau kurang.

c. Biaya pemeliharaan dan perbaikan ringan

Biaya pemeliharaan dan perbaikan ringan adalah biaya untuk memelihara dan memperbaiki sarana dan prasarana sekolah/madrasah untuk mempertahankan kualitas sarana dan prasarana sekolah/madrasah agar layak digunakan sebagai tempat belajar mengajar.

d. Biaya daya dan jasa

Biaya daya dan jasa merupakan biaya untuk membayar langganan daya dan jasa yang mendukung kegiatan belajar mengajar di sekolah/madrasah seperti listrik, telepon, air, dll.

e. Biaya transportasi/perjalanan dinas

Biaya transportasi/perjalanan dinas adalah biaya untuk berbagai keperluan perjalanan dinas pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik baik dalam kota maupun ke luar kota.

f. Biaya konsumsi

Biaya konsumsi adalah biaya untuk penyediaan konsumsi dalam kegiatan sekolah/madrasah yang layak disediakan konsumsi seperti rapat-rapat sekolah/madrasah, perlombaan di sekolah/madrasah, dll.

g. Biaya asuransi

Biaya asuransi adalah biaya membayar premi asuransi untuk keamanan dan keselamatan sekolah/madrasah, pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik seperti asuransi kebakaran, asuransi bencana alam, asuransi kecelakaan praktik kerja di industri, dll.

h. Biaya pembinaan siswa/ekstra kurikuler

Biaya pembinaan siswa/ekstra kurikuler adalah biaya untuk menyelenggarakan kegiatan pembinaan siswa melalui kegiatan ekstra kurikuler, lomba bidang akademik, perpisahan kelas terakhir, pembinaan kegiatan keagamaan, dll.

i. Biaya uji kompetensi

Biaya uji kompetensi digunakan untuk penyelenggaraan ujian kompetensi bagi peserta didik Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang akan lulus.

j. Biaya praktik kerja industri (prakerin)

Biaya praktik kerja industri (prakerin) adalah biaya untuk penyelenggaraan praktik industri bagi peserta didik SMK.

k. Biaya pelaporan

Biaya pelaporan adalah biaya untuk menyusun dan mengirimkan laporan sekolah/madrasah kepada pihak yang berwenang.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Biaya Operasi Pendidikan yaitu biaya yang dikeluarkan untuk membiayai operasional pendidikan. Biaya Operasi dikelompokkan menjadi dua, yaitu Biaya Operasi Personalia dan Biaya Operasi Nonpersonalia. Biaya Operasi Personalia adalah biaya yang dikeluarkan untuk kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan berupa gaji dan tunjangan. Biaya Operasi Nonpersonalia adalah biaya yang dikeluarkan untuk kebutuhan-kebutuhan operasi sekolah seperti alat tulis sekolah, bahan dan alat habis pakai, biaya pemeliharaan dan perbaikan ringan, biaya daya dan jasa, biaya transportasi/perjalanan dinas, biaya konsumsi, biaya asuransi, biaya pembinaan peserta didik/ekstra kurikuler, Biaya uji kompetensi untuk SMK, biaya praktik industri untuk SMK, biaya pelaporan dan biaya-biaya operasi lainnya selain gaji dan tunjangan. Serta biaya dari

komponen investasi ringan dan bantuan untuk siswa miskin yang dikelola oleh sekolah termasuk dalam penghitungan Biaya Operasi.

9. Biaya Investasi Pendidikan

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 62 Biaya Investasi meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap. Sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 mengelompokkan Biaya Investasi menjadi dua yaitu Biaya Investasi Lahan Pendidikan dan Biaya Investasi Selain Lahan Pendidikan.

Biaya Investasi menurut BSNP dalam Naskah Akademik Standar Biaya Pendidikan (2006: 32-33) terdiri dari biaya bahan, bangunan sekolah, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku teks dan perlengkapan lainnya yang lama penggunaannya diperkirakan lebih dari satu tahun. Penentuan harga peralatan pendidikan yaitu:

- a. Alat pembelajaran (alat peraga, komputer, laboratorium, dll)

Ditentukan berdasarkan standar harga yang berlaku di beberapa pemasok peralatan pendidikan sesuai spesifikasi teknis dari Depdiknas.

- b. Perabotan (*meubelier*)

Harga ditentukan berdasarkan standar harga yang berlaku.

- c. Buku referensi/tambahan

Ditentukan berdasarkan harga pasar eceran yang berlaku.

d. Investasi Tenaga Kependidikan: Pendidikan dan Pelatihan Guru

Pengembangan personil tenaga kependidikan, meliputi kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru PNS, guru tetap yayasan, guru honorer, guru diperbantukan (Dpk), staf tata usaha, pesuruh sekolah, satpam, tenaga laboratorium/bengkel, pegawai perpustakaan, pengurus komite sekolah.

Pengembangan personil/SDM meliputi lokakarya, seminar, magang, pelatihan, penataran, dan pendidikan untuk personil/SDM. Mestinya, biaya pengembangan personil/SDM termasuk biaya investasi karena penggunaan atau pemanfaatan hasil pengembangan SDM bukan hanya untuk satu tahun, melainkan lebih dari satu tahun. Namun, karena biaya pengembangan SDM ada setiap tahun dalam nilai riil yang relatif sama maka biaya pengembangan SDM ini dapat diklasifikasikan sebagai biaya operasional.

Dari uraian di atas dapat diambil pengertian Biaya Investasi menurut BSNP, yaitu biaya yang terdiri dari biaya bahan, bangunan sekolah, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku teks dan perlengkapan lainnya yang lama penggunaannya diperkirakan lebih dari satu tahun.

B. Penelitian Relevan

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rika Agustina (2013) tentang Penghitungan Biaya Satuan Pendidikan di SMP BOPKRI 3 Yogyakarta, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besaran biaya satuan pendidikan per peserta didik

per tahun. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa biaya satuan per peserta didik per tahun yang meliputi:

- a. biaya satuan investasi personalia sebesar Rp35.188,00
- b. biaya satuan investasi non personalia sebesar Rp199.825,00
- c. biaya satuan pendidikan operasional personalia sebesar Rp1.405.651,00
- d. biaya satuan operasional non personalia Rp1.200.936,00
- e. Total biaya satuan pendidikan Rp2.841.599,00

Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rika Agustina S adalah sama-sama meneliti tentang Biaya Operasi dan Biaya Investasi. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rika Agustina S adalah lokasi penelitian pada tingkap SMP, sedangkan peneliti melakukan penelitian pada tingkat SMA.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Junaidin (2007) tentang Sistem Pembiayaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas pada Masa Desentralisasi Pendidikan di Kota Bima, menyimpulkan bahwa (1) sumber-sumber biaya sekolah berasal dari: (a) Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota Bima yang besarnya 12,68% dari total sumber biaya sekolah; (b) orang tua berupa iuran wajib dan sumbangan khusus yang besarnya 84,24% dari total sumber biaya sekolah; dan (c) Sumber lain hanya sebesar 3,08% dari total biaya sekolah. (2) pengalokasian biaya pendidikan berupa: (a) Biaya Investasi adalah sebesar 55,51% dari total biaya pendidikan sekolah, dengan rincian untuk penyediaan sarpras (67,05%), pengembangan SDM (27,78%), dan

modal kerja tetap (5,17%); (b) Biaya Operasional adalah sebesar 44,49%, dengan rincian untuk honorarium (7,30%), bahan/peralatan pendidikan habis pakai (10,03%), dan biaya pendidikan tak langsung (82,67%); adapun (c) biaya operasional yang harus dikeluarkan oleh setiap siswa untuk dapat mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan telah melebihi atau sesuai dengan standar biaya yang diperlukan.

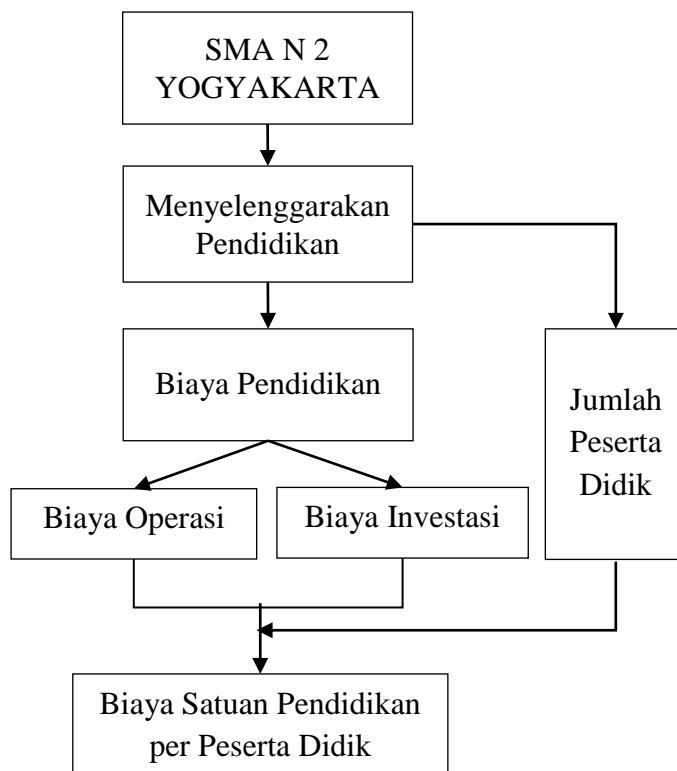
Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Junaidin adalah sama-sama meneliti tentang Biaya Satuan Pendidikan. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Junaidin adalah analisis data menggunakan deskriptif dengan pendekatan kualitatif, sedangkan peneliti menggunakan deskriptif dengan pendekatan kuantitatif.

C. Kerangka Berpikir

Dalam segala aktifitas pendidikan baik dari proses pembelajaran, penyediaan sarana prasarana dan pemenuhan kebutuhan lainnya secara faktual memicu biaya di dalam satuan pendidikan. Biaya pendidikan adalah uang atau nilai uang dari sumber daya pendidikan yang dibutuhkan untuk mengelola dan menyelenggarakan pendidikan. Pada tingkat sekolah (satuan pendidikan), biaya pendidikan diperoleh dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Biaya Pendidikan meliputi Biaya Operasi dan Biaya Investasi. Keseluruhan dari biaya yang diperlukan untuk kebutuhan pendidikan dibagi dengan jumlah peserta didik, akan diperoleh Biaya Satuan Pendidikan per peserta

didik. Biaya Satuan Pendidikan per peserta didik diperlukan sekolah untuk mengetahui seberapa besar biaya yang harus ditanggung oleh masing-masing peserta didik dalam menempuh pendidikan di sekolah. Kerangka berpikir tersebut dapat diilustrasikan sebagaimana gambar di bawah ini.



Gambar 1 . Kerangka Berpikir

D. Pertanyaan Penelitian

- Berdasarkan rumusan masalah, kajian pustaka, dan kerangka pikir di atas, dapat dijabarkan pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Berapakah proporsi sumber pendanaan pendidikan di SMA Negeri 2 Yogyakarta tahun ajaran 2014/2015?

2. Berapakah Biaya Operasi per peserta didik di SMA Negeri 2 Yogyakarta tahun ajaran 2014/2015?
3. Berapakah Biaya Investasi per peserta didik di SMA Negeri 2 Yogyakarta tahun ajaran 2014/2015?
4. Berapakah Biaya Satuan Pendidikan per peserta didik di SMA Negeri 2 Yogyakarta Tahun Ajaran 2014/2015?

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian deskriptif yang dipilih dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengungkap makna yang terkandung di dalam data yang telah dikumpulkan. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk mendapatkan besaran angka dan memaparkan hasil penghitungan Biaya Satuan Pendidikan per peserta didik per tahun. Uraian kesimpulan dalam penelitian ini juga akan dapat dengan mudah dipertanggungjawabkan secara akurat dengan cara selalu mengembalikan pada data yang telah terkumpul.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 2 Yogyakarta yang beralamatkan di Jalan Bener Nomor 30, Tegalrejo, Yogyakarta. Penelitian dilaksanakan pada bulan Agustus sampai November 2015.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, dan bendahara. Objek penelitian ini adalah Biaya Satuan Pendidikan yang meliputi Biaya Operasi dan Biaya Investasi.

D. Definisi Operasional Variabel

Penelitian ini menggunakan satu variabel tunggal yaitu Biaya Satuan Pendidikan. Biaya Satuan Pendidikan adalah jumlah pengeluaran yang diperhitungkan kepada setiap peserta didik untuk menyelenggarakan pendidikan dalam tahun tertentu, tingkat dan jenis pendidikan tertentu atau dalam sekolah tertentu. Biaya ini dapat menjadi suatu ukuran yang menggambarkan seberapa besar biaya yang dialokasikan ke satuan pendidikan secara efektif untuk kepentingan peserta didik dalam menempuh pendidikan. Biaya satuan pendidikan terdiri dari dua komponen, yaitu Biaya Operasi dan Biaya Investasi.

1. Biaya Operasi

Biaya Operasi yaitu biaya yang dikeluarkan untuk membiayai kegiatan operasional sekolah. Biaya Operasi dikelompokkan menjadi dua, yaitu Biaya Operasi Personalia dan Biaya Operasi Nonpersonalia. Biaya Operasi Personalia adalah biaya yang dikeluarkan untuk kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan berupa gaji dan tunjangan. Biaya Operasi Nonpersonalia adalah biaya rutin yang dikeluarkan untuk kebutuhan-kebutuhan operasi sekolah selain untuk kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan.

2. Biaya Investasi

Biaya Investasi adalah biaya yang dikeluarkan sekolah untuk pengadaan barang dan jasa yang mempunyai manfaat lebih dari satu. Dalam hal ini Biaya Investasi antara lain biaya untuk pengadaan alat, pengadaan bangunan, dan pengadaan buku.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Studi Dokumen

Kegiatan mengkaji berbagai dokumen-dokumen yang terkait dengan pembiayaan di sekolah. Dokumen yang dikaji adalah Rekapitulasi Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS), rekapitulasi jumlah peserta didik tahun ajaran 2014/2015, profil sekolah dan berbagai dokumen yang dianggap relevan.

2. Wawancara

Wawancara yaitu menanyakan sejumlah pertanyaan kepada narasumber secara lisan dan tatap muka. Wawancara digunakan untuk mengetahui pembiayaan di SMA Negeri 2 Yogyakarta dan sebagai *cross check* terhadap dokumen yang diperoleh. Narasumber yang akan diwawancara adalah Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Yogyakarta atau pihak lain yang ditunjuk oleh Kepala Sekolah. Wawancara yang akan dilakukan berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian dengan menggunakan pedoman wawancara. Pedoman wawancara berisi daftar pertanyaan yang ditujukan kepada narasumber untuk mengetahui lebih mendalam mengenai besaran Biaya Satuan Pendidikan di SMA Negeri 2 Yogyakarta. Adapun kisi-kisi dari pedoman wawancara dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Kisi-kisi Pedoman Wawancara

No	Variabel	Aspek Variabel	
1	Biaya Operasi	a. Biaya Operasi Personalia b. Biaya operasi Nonpersonalia	
2	Biaya Investasi	a. Bangunan b. Buku c. Peralatan	
3	Sumber Pendanaan	a. Pemerintah Pusat b. Pemerintah Daerah c. Masyarakat	Studi Dokumen RAPBS

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data menggunakan deskriptif secara kuantitatif. Data yang telah dikumpulkan kemudian dilakukan penghitungan Biaya Satuan Pendidikan. Analisis data dilakukan dengan mendeskripsikan hasil penelitian dan menyajikan data dalam bentuk tabel dan grafik dengan bantuan program *microsoft excel* untuk menggambarkan pembiayaan pendidikan. Penghitungan Biaya Satuan Pendidikan per peserta didik dapat menggunakan formula sebagai berikut:

$$S_b (s,t) = f (K(s,t) \text{ dan } M(s,t))$$

Keterangan:

S_b = biaya satuan pendidikan per peserta didik per tahun

K = jumlah seluruh pengeluaran

M = jumlah peserta didik

s = sekolah tertentu

t = tahun tertentu

(Nanang Fattah, 2004: 27)

Secara ringkas, penghitungan Biaya Satuan Pendidikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Mengumpulkan dokumen antara lain Rekapitulasi RAPBS tahun ajaran 2014/2015, daftar peserta didik tahun ajaran 2014/2015 dan profil SMA Negeri 2 Yogyakarta.
- 2) Mengklasifikasi biaya-biaya yang termasuk kelompok Biaya Operasi Personalia dan Biaya Operasi Nonpersonalia, kemudian menghitung Biaya Operasi per peserta didik dengan membagi antara total Biaya Operasi dengan jumlah peserta didik.
- 3) Mengklasifikasi biaya-biaya yang termasuk kelompok Biaya Investasi, kemudian menghitung Biaya Investasi per peserta didik dengan membagi antara total Biaya Investasi dengan jumlah peserta didik.
- 4) Menghitung Biaya Satuan Pendidikan per peserta didik dengan menggunakan rumus fungsi tersebut di atas, yang dijabarkan pada cara sebagai berikut:

Tabel 2. Kisi-Kisi Penghitungan Biaya Satuan Pendidikan Per Peserta Didik

Keterangan	Kode
Total Biaya Operasi	a
Total Biaya Investasi	b
Total Biaya Satuan Pendidikan	c (a+b)
Jumlah Peserta didik	d
Biaya Satuan Pendidikan per peserta didik	e (c/d)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Data Umum SMA Negeri 2 Yogyakarta

1. Profil SMA Negeri 2 Yogyakarta

SMA Negeri 2 Yogyakarta merupakan salah satu Sekolah Menengah Atas Negeri di Yogyakarta yang beralamatkan di Jalan Bener Nomor 30, Tegalrejo, Yogyakarta. SMA Negeri 2 Yogyakarta pada awalnya merupakan SMA YPK yang didirikan oleh Yayasan Pembinaan Kesejahteraan POMG SMP Negeri 6 Yogyakarta. Dalam proses perubahan menjadi Sekolah Negeri, SMA YPK dijadikan filial SMA Negeri 1 Teladan Yogyakarta terlebih dahulu selama 1 tahun. Kemudian secara resmi menjadi Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Yogyakarta dengan SK Menteri P dan K Republik Indonesia tanggal 17 Juli 1965 No. 98/SA/B/III/65-66, dan sebagai Kepala Sekolah ditunjuk Drs. Soemardji. Sejak tahun 2008 SMA Negeri 2 Yogyakarta mampu menunjukkan prestasinya hingga sekarang diberi kepercayaan untuk melaksanakan program Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI).

SMA Negeri 2 Yogyakarta mempunyai Visi dan Misi sekolah sebagai berikut:

a. Visi SMA Negeri 2 Yogyakarta

Unggul dalam IMTAQ dan IPTEK, cerdas dan berakhhlak mulia serta siap berkompetisi dalam dunia global.

b. Misi SMA Negeri 2 Yogyakarta

- 1) Mendidik siswa agar beriman kepada Tuhan yang Maha Esa, dan berakhhlak mulia.
- 2) Mendidik siswa agar memiliki kecerdasan intelektual, emosional, spiritual.
- 3) Mendidik siswa agar memiliki wawasan kemasyarakatan dan kebangsaan serta memiliki kepekaan sosial yang tinggi.
- 4) Melaksanakan pembelajaran yang profesional dan efektif agar siswa mampu mengembangkan diri sesuai bakat dan potensinya secara optimal dalam bidang akademik non akademik sehingga mampu berkompetisi di era global.
- 5) Mengembangkan kemampuan siswa dalam berbahasa Indonesia, berbahasa Jawa, berbahasa Inggris, dan berbahasa asing lain, serta dalam bidang IPTEK, olahraga, seni dan budaya.
- 6) Mengembangkan sistem kelembagaan, organisasi, manajemen, administrasi, budaya saling mendukung kerja, serta mengembangkan sumber daya manusia warga sekolah guna mewujudkan sekolah yang dinamis dan berprestasi.
- 7) Menciptakan akademik atmosfir dan iklim kerja yang harmonis, budaya santun, dan budaya tertib, serta saling hormat antar warga sekolah, orang tua, dan masyarakat sekitar.

2. Peserta Didik dan Rombongan Belajar

Total Jumlah Rombongan Belajar SMA Negeri 2 Yogyakarta adalah 27 kelas, secara umum terdiri dari 2 bidang peminatan, yaitu Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Dalam perkembangannya ada perubahan nama untuk setiap peminatan, perubahan ini terjadi sejak tahun ajaran 2013/2014. Pada tahun ajaran 2013/2014 mulai menggunakan nama kelas Peminatan Matematika dan Ilmu-Ilmu Alam (PMIIA) dan Peminatan Ilmu-Ilmu Sosial (PIIS). Karena ada perubahan tersebut maka tahun ajaran 2014/2015 ada perbedaan nama kelas, yaitu kelas PMIIA dan PIIS untuk kelas X dan kelas XI, sedangkan kelas XII masih menggunakan nama kelas IPA dan kelas IPS. Berikut rincian Rombongan Belajar SMA Negeri 2 Yogyakarta tahun ajaran 2014/2015:

Tabel 3. Rombongan Belajar SMA Negeri 2 Yogyakarta Tahun Ajaran 2014/2015

No.	Kelas	Jumlah Rombongan Belajar			
		Kelas X	Kelas XI	Kelas XII	Jumlah
1	PMIIA	8 Kelas	7 Kelas	-	15 Kelas
2	PIIS	1 Kelas	2 Kelas	-	3 Kelas
3	IPA	-	-	7 Kelas	7 Kelas
4	IPS	-	-	2 Kelas	2 Kelas
Jumlah		9 Kelas	9 Kelas	9 Kelas	27 Kelas

Sumber: Profil SMA Negeri 2 Yogyakarta

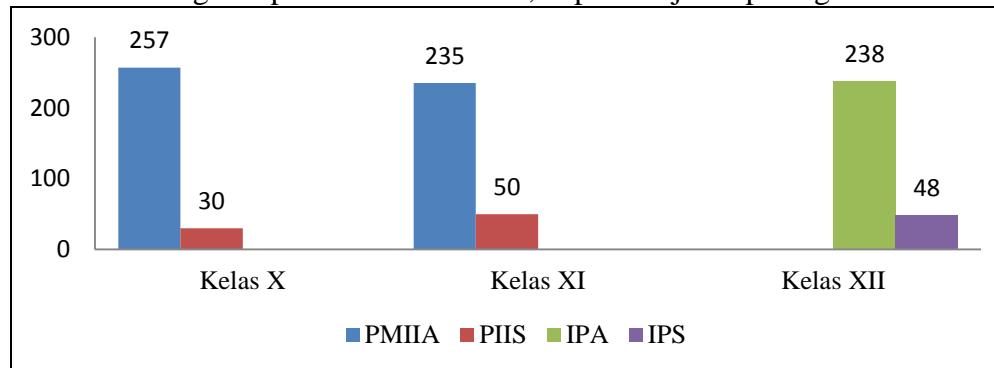
Jumlah peserta didik di SMA Negeri 2 Yogyakarta tahun ajaran 2014/2015 adalah 858 orang yang terdiri dari 314 peserta didik laki-laki dan 544 peserta didik perempuan. Berikut rincian mengenai peserta didik SMA Negeri 2 Yogyakarta tahun ajaran 2014/2015:

Tabel 4. Rincian Peserta Didik SMA Negeri 2 Yogyakarta Tahun Ajaran 2014/2015

Peserta Didik Kelas X					
No	PMIIA		PIIS		Jumlah
	P	L	P	L	
1	22	11	22	8	63
2	21	11	-	-	32
3	17	15	-	-	32
4	18	14	-	-	32
5	23	9	-	-	32
6	17	15	-	-	32
7	23	9	-	-	32
8	20	12	-	-	32
Jumlah	161	96	22	8	287
Peserta Didik Kelas XI					
No.	PMIIA		PIIS		Jumlah
	P	L	P	L	
1	22	12	20	6	60
2	25	9	15	9	58
3	23	11	-	-	34
4	23	11	-	-	34
5	13	21	-	-	34
6	22	12	-	-	34
7	24	7	-	-	31
Jumlah	152	83	35	15	285
Peserta Didik Kelas XII					
No.	IPA		IPS		Jumlah
	P	L	P	L	
1	19	15	16	8	58
2	21	13	16	8	58
3	21	13	-	-	34
4	18	16	-	-	34
5	21	13	-	-	34
6	23	11	-	-	34
7	19	15	-	-	34
Jumlah	142	96	32	16	286
Total	455	275	89	39	858

Sumber: Daftar Peserta Didik Tahun Ajaran 2014/2015

Dari data mengenai peserta didik di atas, dapat disajikan pada gambar berikut:



Gambar 2. Grafik Jumlah Peserta Didik di SMA Negeri 2 Yogyakarta Tahun Ajaran 2014/2015

3. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana merupakan salah satu faktor pendukung dalam menunjang keberhasilan proses pembelajaran di sekolah. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai akan memperlancar kegiatan belajar mengajar, sebaliknya apabila sarana dan prasarana tidak memadai maka akan menghambat keberhasilan proses pembelajaran di sekolah.

Keadaan tanah dan bangunan serta sarana dan prasarana SMA Negeri 2 Yogyakarta, adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Keadaan Tanah dan Bangunan di SMA Negeri 2 Yogyakarta

Keterangan	Luas
Bersertifikat	9097 m ²
Belum Bersertifikat	470 m ²
Terdiri dari:	
Bangunan	3856 m ²
Halaman dan taman	5911 m ²
Lap. Olahraga	900 m ²
Jalan masuk sekolah	470 m ²

Sumber: Profil SMA Negeri 2 Yogyakarta

Tabel 6. Sarana dan Prasarana di SMA Negeri 2 Yogyakarta Tahun Ajaran 2014/2015

No.	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah	Luas (m ²)	Keadaan ruang
1	Ruang Teori/Kelas	25	1552	Baik
2	Lab. Fisika	1	120	Baik
3	Lab. Biologi	1	120	Baik
4	Lab. Kimia	1	120	Baik
5	Lab. Komputer/TI	2	240	Baik
6	Lab. Bahasa	1	110	Baik
7	Lav. AVA	1	84	Baik
8	Lab. Media Pendidikan	1	192	Baik
9	Ruang Perpustakaan	1	203	Baik
10	Ruang Kantor OSIS	1	21	Baik
11	Ruang Koperasi OSIS	1	21	Baik
12	Masjid	1	150	Baik
13	Ruang Aula	1	169	Baik
14	Ruang Kantor BP/BK	1	56	Baik
15	Ruang Kantor Guru	1	98	Baik
16	Ruang Kantor TU	1	105	Baik
17	Ruang Kantor Kasek	1	56	Baik
18	Ruang Piket Guru	1	912	Baik
19	Ruang Agama Katolik	1	20	Baik
20	Sanggar Pramuka dan Pecinta Alam	1	9	Baik
21	Ruang Palang Merah Remaja	1	20	Baik
22	Gudang Keterampilan	4	24	Baik
23	Gudang ATK, dll	1	24	Baik
24	Ruang UKS	1	21	Baik
25	Ruang Ganti OR	4	60	Baik
26	Gardu Jaga Satpam	1	2	Baik
27	Barak Kendaraan	3	460	Baik
28	Kantin	4	142	Baik
29	Lapangan Volley	1	450	Baik
30	Lapangan Loncat Jauh	1	350	Baik
31	Rumah Penjaga Sekolah	1	24	Baik
32	Ruang WC/KM	24	62	Baik

Sumber: Profil SMA Negeri 2 Yogyakarta

Fasilitas lain yang terdapat di SMA Negeri 2 Yogyakarta, yaitu semua ruangan dan laboratorium dilengkapi dengan LCD; ruang Multimedia lengkap

dengan fasilitas LCD, TV 43”, OHP, Komputer Multi Media, *Sound System*; jaringan Internet tersambung secara LAN, di Laboratorium Komputer, Perpustakaan, Ruang BK, Ruang Guru, Ruang TU, dan Ruang Kepala Sekolah; *Hot Spot* dengan *Bandwith* sebesar 384 Kbps, dengan 3 *access point integrated*; serta fasilitas Website Smada: www.sman2jogja.sch.id dengan layanan informasi kegiatan siswa dan informasi berita pendidikan.

B. Data Khusus SMA Negeri 2 Yogyakarta

1. Sumber-sumber Pendanaan Pendidikan SMA Negeri 2 Yogyakarta

Dari hasil studi dokumen RAPBS dan *cross check* melalui wawancara dapat disajikan sumber-sumber pendanaan pendidikan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (APBD 1), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta (APBD 2), dan dari Iuran Peserta Didik. Berikut rincian sumber-sumber pendanaan pendidikan SMA Negeri 2 Yogyakarta tahun ajaran 2014/2015:

Tabel 7. Keadaan Sumber-Sumber Pendanaan Pendidikan SMA Negeri 2 Yogyakarta Tahun Ajaran 2014/2015

No.	Sumber Pendanaan	Anggaran	Realisasi
1	APBN	Rp858.000.000	Rp858.000.000
2	APBD 1	Rp254.868.500	Rp254.868.500
3	APBD 2	Rp1.884.205.000	Rp1.884.205.000
4	Iuran Peserta Didik	Rp1.609.905.000	Rp1.367.986.750
Jumlah		Rp4.606.978.500	Rp4.365.060.250

Sumber: Data yang diolah

2. Biaya Operasi

Dalam penelitian ini Biaya Operasi dijabarkan menjadi dua, yaitu Biaya Operasi Personalia dan Biaya Operasi Nonpersonalia. Biaya Operasi Personalia di SMA Negeri 2 Yogyakarta meliputi gaji guru honorer, gaji pegawai honorer, honor yang diperoleh selain gaji dan tunjangan, kesejahteraan tambahan (maslahat tambahan), dan biaya pengembangan sumber daya manusia. Biaya Operasi Nonpersonalia adalah biaya yang dikeluarkan untuk kebutuhan-kebutuhan operasi sekolah kecuali yang berhubungan dengan kesejahteraan pendidik maupun tenaga kependidikan. Berikut tabel rekapitulasi Biaya Operasi di SMA Negeri 2 Yogyakarta, yang secara penuh dikelola oleh pihak sekolah:

Tabel 8. Rekapitulasi Biaya Operasi SMA Negeri 2 Yogyakarta Tahun Ajaran 2014/2015

No.	Komponen Biaya Operasi	Jumlah
1	Biaya Operasi Personalia	Rp1.396.753.150
2	Biaya Operasi Nonpersonalia	Rp2.335.085.100
Jumlah		Rp3.731.838.250

Sumber: Data yang diolah

Dari data tersebut dapat dihitung Biaya Operasi per peserta didik dengan membagi antara total Biaya Operasi Rp3.731.838.250,00 dan jumlah peserta didik sejumlah 858. Maka diperoleh Biaya Operasi per peserta didik SMA Negeri 2 Yogyakarta tahun ajaran 2014/2015 adalah Rp4.349.461,83.

3. Biaya Investasi

Berdasarkan dokumen RAPBS dapat diketahui rincian Biaya Investasi di SMA Negeri 2 Yogyakarta tahun ajaran 2014/2015, sebagai berikut:

Tabel 9. Rekapitulasi Biaya Investasi SMA Negeri 2 Yogyakarta Tahun Ajaran 2014/2015

No.	Komponen Biaya Investasi	Jumlah
1	Pengembangan Sarpras	-
2	Pengadaan Alat	Rp400.415.000
3	Buku	Rp232.807.000
	Jumlah	Rp633.222.000

Sumber: Data yang diolah

Dari data tersebut dapat dihitung Biaya investasi per peserta didik dengan membagi antara total Biaya Investasi Rp633.222.000,00 dan jumlah peserta didik sejumlah 858. Maka diperoleh Biaya Operasi per peserta didik SMA Negeri 2 Yogyakarta tahun ajaran 2014/2015 adalah Rp738.020,98.

4. Biaya Satuan Pendidikan

Penghitungan Biaya Satuan Pendidikan di SMA Negeri 2 Yogyakarta tahun ajaran 2014/2015 sebagai berikut:

Tabel 10. Penghitungan Biaya Satuan Pendidikan SMA Negeri 2 Yogyakarta Tahun Ajaran 2014/2015

Keterangan	Kode	Jumlah	Persentase
Total Biaya Operasi	a	R3.731.838.250	85,5 %
Total Biaya Investasi	b	Rp633.222.000	14,5 %
Total Biaya Satuan Pendidikan (a+b)	c	Rp4.365.060.250	100 %
Jumlah Peserta didik	d	858	
Biaya Satuan Pendidikan per peserta didik	e	Rp5.087.482,81	

C. Pembahasan

1. Sumber-Sumber Pendanaan Pendidikan SMA Negeri 2 Yogyakarta

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat dikatakan bahwa sumber pendanaan pendidikan SMA Negeri 2 Yogyakarta berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (APBD 1), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta (APBD 2), dan Iuran Peserta didik yang disebut dana Komite Sekolah. Adapun persentase dari sumber-sumber pendanaan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 11. Persentase Sumber-Sumber Pendanaan Pendidikan SMA Negeri 2 Yogyakarta Tahun Ajaran 2014/2015

No.	Sumber Pendanaan	Anggaran	Jumlah	Per sentase
1	APBN	Rp858.000.000	Rp858.000.000	20 %
2	APBD 1	Rp254.868.500	Rp254.868.500	6 %
3	APBD 2	Rp1.884.205.000	Rp1.884.205.000	43 %
4	Komite Sekolah	Rp1.609.905.000	Rp1.367.986.750	31 %
Jumlah		Rp4.606.978.500	Rp4.365.060.250	100 %

Sumber: Data yang diolah

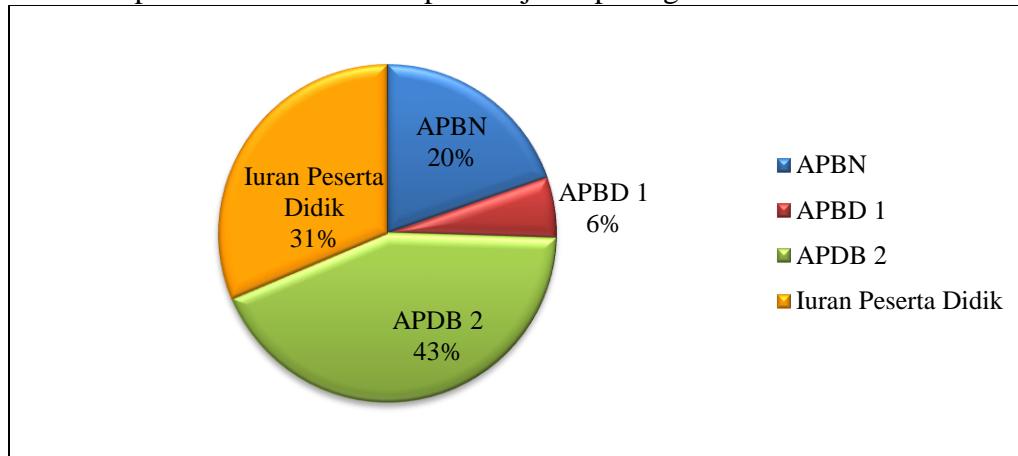
Dari data sumber pendanaan di atas, dapat disajikan pada gambar berikut:



Gambar 3. Grafik perbandingan Rencana Anggaran dan Realisasi Anggaran Tahun Ajaran 2014/2015

Dari grafik tersebut dapat diketahui ada selisih sebesar Rp241.918.850,00 antara Rencana Anggaran dan Realisasi Anggaran. Selisih tersebut disebabkan ada beberapa peserta didik yang tidak membayar iuran pada tahun ajaran 2014/2015 dan mengakibatkan RAPBS yang telah dirancang tidak terealisasi sepenuhnya.

Dari data persentase tabel 11. dapat disajikan pada gambar berikut:



Gambar 4. Grafik Persentase Sumber-sumber Pendanaan Pendidikan SMA Negeri 2 Yogyakarta Tahun Ajaran 2014/2015

Dari grafik tersebut terlihat dana terbesar berasal dari dana APBD 2 yaitu sebesar 43% dari total realisasi sumber pendanaan pendidikan. Selanjutnya dana dari Komite Sekolah sebesar 31% dari total realisasi sumber pendanaan pendidikan, dana APBN sebesar 20% dari total realisasi sumber pendanaan pendidikan, dan yang terendah dari dana APBD 1 sebesar 6% dari total realisasi sumber pendanaan pendidikan. Dari sumber Pendanaan tersebut masih dijabarkan ke dalam beberapa jenis dana, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 12. Persentase Jenis Dana dari Sumber Pendanaan Pendidikan SMA Negeri 2 Yogyakarta Tahun Ajaran 2014/2015

No.	Sumber Pendanaan Pendidikan	Jenis Dana	Jumlah (Rp)	Persentase atas Sumber Pendanaan
1	APBN	BOSN	858.000.000	100 %
2	APBD 1	BOSDA	254.868.500	100 %
3	APBD 2	BOP	1.804.987.000	95 %
		JPD	45.000.000	3 %
		UNAS	34.218.000	2 %
4	Iuran Peserta Didik	Komite Sekolah	1.367.986.750	100 %

Sumber: Data yang diolah

Dari tabel tersebut dapat diketahui Sumber Pendanaan APBN sebesar Rp858.000.000,00 seluruhnya berasal dari Dana Bantuan Operasional Siswa Nasional (BOSN). Sumber Pendanaan APBD 1 sebesar Rp254.868.500,00 seluruhnya berasal dari Dana Bantuan Operasional Siswa Daerah (BOSDA). Sumber Pendanaan APBD 2 sebesar Rp1.884.205.000,00 terdiri dari 95% Dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP), 3% Dana Jaminan Pendidikan Daerah (JPD), dan 2% Dana penyelengaraan ujian (UNAS). Dana Komite Sekolah sebesar Rp1.367.986.750,00 seluruhnya dari Iuran Peserta Didik.

2. Biaya Operasi

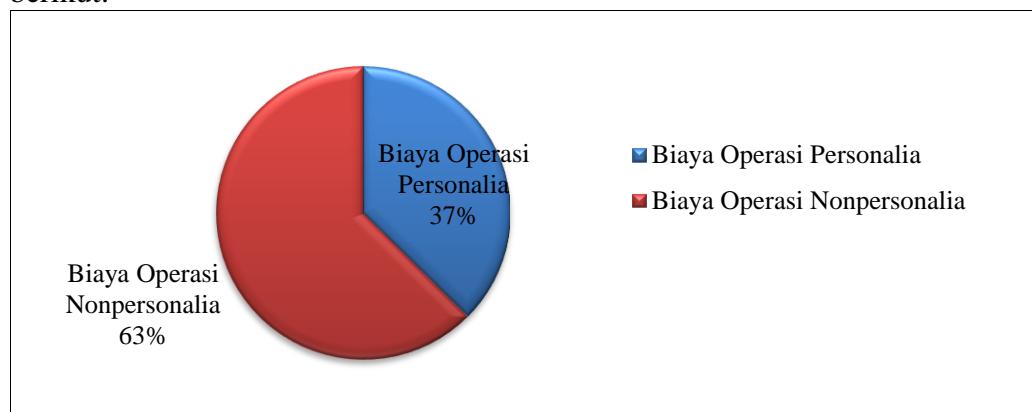
Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa Biaya Operasi per peserta didik di SMA Negeri 2 Yogyakarta sebesar Rp4.349.461,83. Biaya Operasi tersebut terdiri dari Biaya Operasi Personalia dan Biaya Operasi Nonpersonalia. Berikut merupakan persentase alokasi Biaya Operasi SMA Negeri 2 Yogyakarta tahun ajaran 2014/2015:

Tabel 13. Persentase Biaya Operasi SMA Negeri 2 Yogyakarta Tahun Ajaran 2014/2015

No.	Komponen Biaya Operasi	Jumlah	Persentase
1	Biaya Operasi Personalia	Rp1.396.753.150	37 %
2	Biaya Operasi Nonpersonalia	Rp2.335.085.100	63 %
	Jumlah	Rp3.731.838.250	100 %

Sumber: Data yang diolah

Dari data persentase Biaya Operasi di atas, dapat disajikan pada gambar berikut:



Gambar 5. Grafik Persentase Biaya Operasi SMA Negeri 2 Yogyakarta Tahun Ajaran 2014/2015

Dari grafik di atas dapat diketahui, pengalokasian untuk Biaya Operasi Personalia lebih rendah daripada Biaya Operasi Nonpersonalia, yaitu Biaya Operasi Personalia sebesar Rp1.396.753.150,00 (37%) dan Biaya Operasi Nonpersonalia sebesar Rp2.335.085.100,00 (63%).

a) Biaya Operasi Personalia

Biaya Operasi Personalia adalah biaya yang rutin dikeluarkan sekolah yang berkaitan dengan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan. Namun dalam penelitian ini, tidak membahas Biaya Operasi Personalia berupa gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta tunjangan yang melekat pada gaji

khususnya yang bersumber dari pemerintah. Hal ini dikarenakan gaji pendidik atau tenaga kependidikan serta tunjangan yang melekat pada gaji merupakan jenis anggaran rutin dari pemerintah sebagai konsekuensi/tanggung jawab negara dalam menggaji setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) sesuai dengan kepangkatan, golongan dan ruang atau ketentuan yang berlaku. Namun demikian, pembahasan ini peneliti hanya mendeskripsikan honorarium yang terdapat dalam rekapitulasi RAPBS SMA Negeri 2 Yogyakarta tahun ajaran 2014/2015. Adapun rincian Biaya Operasional Personalia dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 14. Alokasi Biaya Operasi Personalia SMA Negeri 2 Yogyakarta Tahun Ajaran 2014/2015

No.	Komponen Biaya Operasi Personalia	Jumlah
1	Administrasi Layanan Pendidikan	Rp418.332.730
2	Program Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp978.420.420
Jumlah		Rp1.396.753.150

Sumber: Data yang diolah

Alokasi dana Administrasi Layanan Pendidikan sebesar Rp418.332.730,00 digunakan untuk membayar honor Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT). Sedangkan Program Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebesar Rp978.420.420,00 digunakan untuk Peningkatan Kualitas guru dan karyawan, Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah, Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik, Peningkatan Kualitas Tenaga Perpustakaan dan Pelayanan Administrasi Perkantoran.

b) Biaya Operasi Nonpersonalia

Biaya Operasi Nonpersonalia adalah biaya yang rutin dikeluarkan sekolah selain untuk kesejahteraan personalia sekolah. Total Biaya Operasi Nonpersonalia di SMA Negeri 2 Yogyakarta tahun ajaran 2014/2015 adalah sebesar Rp2.335.085.100,00. Biaya tersebut digunakan untuk kegiatan operasional sekolah dalam periode satu tahun. Diantaranya digunakan untuk Biaya ATS/BAHP, Biaya Perbaikan dan Pemeliharaan Ringan, Biaya Daya dan Jasa, Biaya Transportasi/Perjanan Dinas, Biaya Konsumsi, Biaya Pembinaan Peserta Didik/Ekstrakurikuler, Biaya Uji Kompetensi, dan lain-lain.

3. Biaya Investasi

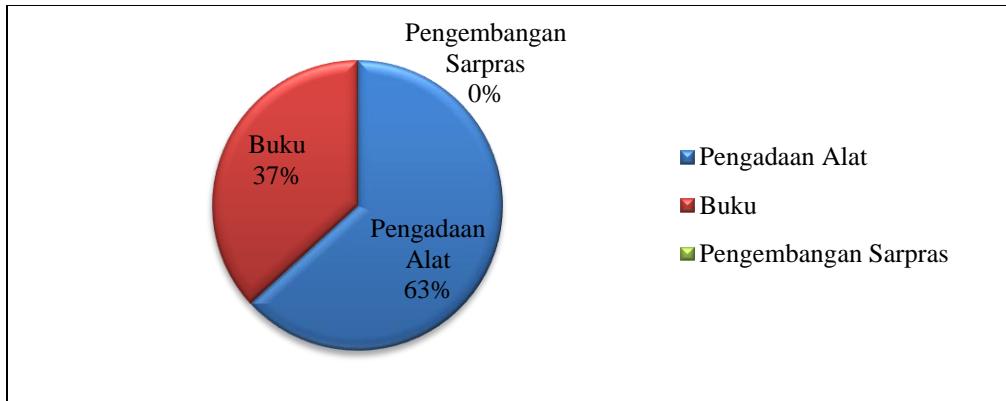
Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa total Biaya Investasi sebesar Rp633.222.000,00 dan Biaya Investasi per peserta didik di SMA Negeri 2 Yogyakarta sebesar Rp4.352.957,63. Berikut rincian dan persentase alokasi Biaya Investasi SMA Negeri 2 Yogyakarta tahun ajaran 2014/2015:

Tabel 15. Persentase Biaya Investasi SMA Negeri 2 Yogyakarta Tahun Ajaran 2014/2015

No.	Komponen Biaya Investasi	Jumlah	Persentase
1	Pengembangan Sarpras	-	0 %
2	Pengadaan Alat	Rp400.415.000	63 %
3	Buku	Rp232.807.000	37 %
Jumlah		Rp633.222.000	100 %

Sumber: Data yang diolah

Dari tabel persentase Biaya Investasi di atas, dapat disajikan pada gambar berikut:



Gambar 6. Persentase Biaya Investasi SMA Negeri 2 Yogyakarta tahun ajaran 2014/2015

Berdasarkan grafik tersebut terlihat sebagian besar Biaya Investasi digunakan untuk pengadaan alat yaitu sebesar Rp400.415.000,00 (63%). Biaya tersebut dipergunakan untuk pengadaan peralatan Lab IPA, pengadaan peralatan Lab TIK, pengadaan LCD proyektor, pengadaan Genset Listrik. Selanjutnya sebessar Rp232.222.000,00 dipergunakan untuk pengadaan buku perpustakaan. Pada tahun ajaran 2014/2015, SMA Negeri 2 Yogyakarta tidak mempunyai anggaran untuk melaksanakan pengembangan sarana dan prasarana.

4. Penghitungan Biaya Satuan Pendidikan

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh Biaya Satuan Pendidikan sebesar Rp4.365.060.250,00 dan Biaya Satuan Pendidikan per perserta didik sebesar Rp5.087.482,81. Jumlah tersebut diluar biaya kesejahteraan pendidikan dan tenaga kependidikan PNS. Apabila di sekolah ada investasi

berupa pembangunan fisik maka Biaya Investasi akan naik dan berimplikasi pada kenaikan Biaya Satuan Pendidikan.

D. Keterbatasan Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini masih banyak kekurangan akibat berbagai ketebatasan, sehingga memungkinkan untuk dilakukan pengkajian lebih lanjut. Beberapa keterbatasan dimaksud antara lain:

1. Penelitian ini hanya dilakukan di SMA Negeri 2 Yogyakarta sehingga hanya menggambarkan keadaan di sekolah tersebut.
2. Penelitian ini hanya dilakukan pada tahun ajaran 2014/2015 sehingga setiap tahunnya biaya pendidikan di sekolah dapat berubah.
3. Tidak ada rincian biaya dalam RAPBS karena data tersebut merupakan dokumen rahasia sekolah.
4. Tidak ada rincian untuk gaji, tunjangan tambahan penghasilan untuk PNS, karena sulit penelusuran data di lapangan.
5. Penghitungan Biaya Satuan Pendidikan masih menggunakan metode tradisional.

BAB V **SIMPULAN DAN SARAN**

A. Simpulan

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu sebagai berikut:

1. Sumber pendanaan di SMA Negeri 2 Yogyakarta berasal dari APBN sebesar Rp858.000.000,00; APBD 1 sebesar Rp254.868.500,00; APBD 2 sebesar Rp1.884.205.000,00; dan Komite Sekolah sebesar Rp1.367.986.750,00.
2. Biaya Operasi per peserta didik di SMA Negeri 2 Yogyakarta tahun ajaran 2014/2015 adalah Rp4.349.461,83.
3. Biaya Investasi per peserta didik di SMA Negeri 2 Yogyakarta tahun ajaran 2014/2015 adalah Rp738.020,98
4. Biaya Satuan Pendidikan per peserta didik di SMA Negeri 2 Yogyakarta tahun ajaran 2014/2015 adalah Rp5.087.482,81.

B. Saran

Berdasarkan pada hasil penelitian ini, peneliti memberikan saran kepada pihak yang berkepentingan sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai pertimbangan pemerintah dalam menetapkan alokasi anggaran di bidang pendidikan karena jika dibandingkan, sumber dana dari Komite Sekolah masih cukup tinggi.

2. Bagi Penyelenggaran Pendidikan

- a. Penyelenggaran Pendidikan disarankan untuk selalu menghitung Biaya Satuan Pendidikan per peserta didik setiap tahun agar dapat mengetahui grafik perubahan Biaya Satuan Pendidikan.
- b. Sekolah dapat menggunakan model penghitungan Biaya Satuan Pendidikan pada penelitian ini untuk menghitung kebutuhan biaya per tahun.

3. Bagi masyarakat

- a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan informasi mengenai jumlah biaya pendidikan dan besarnya dana tambahan yang masih dibutuhkan untuk menutup biaya sehingga sekolah masih mengadakan pungutan kepada orang tua.
- b. Masyarakat disarankan untuk mencermati hasil penelitian ini agar lebih bijak dalam berpendapat tentang biaya pendidikan.

4. Bagi peneliti lain

Bagi penelitian lain, hendaknya dapat mengembangkan penelitian yang sejenis karena dalam penelitian ini hanya diteliti variabel Biaya Operasi dan Biaya Investasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Dadang Suhardan, Riduwan, & Enas. (2012). *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: Alfabeta
- Dedi Supriadi. (2010). *Biaya Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Harsono. (2007). *Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Book Publisher
- Indra Bastian. (2007). *Akuntansi Pendidikan*. Jakarta: Erlangga
- Junaidin. (2007). Sistem Pembiayaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas pada Masa Desentralisasi Pendidikan di Kota Bima. *Tesis Magister*. Tidak diterbitkan, Universitas Negeri Yogyakarta
- Jusuf Enoch. (1995). *Dasar-Dasar Perencanaan Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Kemenkoskesra & Depdiknas & Depag & DBEI & USAID. (2011). *Panduan Penghitungan Biaya Operasional satuan Pendidikan*. Desesntralized Basic Education 1 Management & Goverment
- Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 580/KEP/2011 tentang Penetapan Jaminan Pendidikan Daerah Bagi Peserta Didik Pemegang Kartu Menuju Sejahtera (KMS)
- Matin. (2014). *Manajemen Pembiayaan Pendidikan Konsep dan Aplikasinya*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- _____. (2013). *Dasar-Dasar Perencanaan Pendidikan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Moch. Idochi Anwar. (2013). *Administrasi Pendidikan dan Manajemen Biaya Pendidikan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Muljani A Nurhadi. (2011). *Dilema Kebijakan Pendanaan Pendidikan*. Yogyakarta: Nurhadi Center
- Mulyasa. (2009). *Manajemen Berbasis Sekolah (konsep, strategi, implementasi)*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Mulyono. (2010). *Konsep Pembiayaan Pendidikan*. Yogayakarta: Ar-Ruzz Media

- Nanang Fattah. (2008). Pembiayaan Pendidikan: Landasan Teori dan Studi Empiris. *Jurnal Pendidikan Dasar 9*
- _____. (2004). *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Peraturan Pemerintah No 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
- Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun Standar Biaya Operasi Nonpersonalia
- Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Untuk Satuan Pendidikan Dasar Yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah
- Rika Agustina. (2013). Penghitungan Biaya Satuan Pendidikan SMP BOPKRI 3 Yogyakarta. *Skripsi*. Tidak diterbitkan. Universitas Negeri Yogyakarta
- Suharsimi Arikunto & Lia Yuliana. (2008). *Manajemen Pendidikan*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Tim Ahli Standar Biaya Pendidikan. (2006). *Naskah Akademik Standar Biaya Pendidikan*. Jakarta: BSNP
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- UUD Negara Republik Indonesia 1945

LAMPIRAN 1

Rekapitulasi RAPBS SMA Negeri 2

Yogyakarta Tahun Ajaran 2014/2015

LAMPIRAN 2

Rekapitulasi

Anggaran dan Realisasi Dana Komite Sekolah

SMA NEGERI 2 YOGYAKARTA TAHUN

AJARAN 2014/2015

LAMPIRAN 3

Daftar Peserta Didik SMA Negeri 2

Yogyakarta Tahun Ajatan 2014/2015

LAMPIRAN 4

Hasil Wawancara

1. Biaya Operasi

- a. Mengapa gaji guru tidak masuk dalam RAPBS?
 - Dalam RAPBS tidak tercantum biaya gaji untuk pendidik dan tenaga kependidikan PNS karena semua gaji sudah ditransfer secara langsung ke masing-masing orang tanpa melalui sekolah.

- b. Selain Biaya Operasi Personalia dan Biaya Operasi Nonpersoalia, apakah ada Biaya Operasi seperti Beasiswa yang dikelola oleh sekolah?
 - Selama biaya sekolah menjadi Rp40.000,00 sudah tidak ada beasiswa yang dikelola oleh sekolah.

2. Biaya Investasi

Mengapa tidak ada anggaran untuk pengembangan sarana prasana?

- Sekolah tidak boleh menganggarkan untuk pengembangan sarana dan prasana dalam bentuk bangunan/fisik setiap tahun, untuk tahun ajaran 2014/2015 memang tidak ada pengembangan bangunan/fisik.

3. Sumber-Sumber Pendanaan

- a. Dalam RAPBS ada beberapa jenis sumber dana, bagaimanakah alokasi sumber-sumber pendanaan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan dari Iuran?
 - Dari Pemerintah Pusat ada dana BOSN
Dari Pemerintah Daerah tingkat Provinsi (APBD 1) ada dana BOSDA
Dari Pemerintah Daerah tingkat Kota (APBD 2) ada BOP, JPD, UNAS
Iuran dari siswa masuk dalam dana Komite Sekolah

- b. Mengapa ada selisih dalam Anggaran Komite Sekolah?
- Dana Komite Sekolah tidak terserap semua, hal ini disebabkan oleh ada beberapa siswa yang tidak membayar uang SPP bahkan anak tersebut sudah dinyatakan lulus dari sekolah. Dari semua anggaran hanya dari komite sekolah yang tidak terealisasikan secara penuh, selain itu semua terealisasikan secara penuh karena memang dalam anggarannya sudah ada plot-plot kegiatan yang harus dilaksanakan.

LAMPIRAN 5

Surat-Surat



PEMERINTAHAN KOTA YOGYAKARTA
DINAS PERIZINAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 514448, 515865, 515865, 515866, 562682

Fax (0274) 555241

E-MAIL : perizinan@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS : 081227625000 HOT LINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id

WEBSITE : www.perizinan.jogjakota.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 070/2970
5552/34

Membaca Surat : Dari Surat izin/ Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor : 070/REG/V/159/6/2015 Tanggal : 10 September 2015

Mengingat : 1. Peraturan Gubernur Daerah istimewa Yogyakarta Nomor : 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;
5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 20 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;

Dijinkan Kepada : Nama : ANASTASIA IDE CAHYANINGRUM
No. Mhs/ NIM : 11403244064
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Ekonomi - UNY
Alamat : Kampus Karangmalang, Yogyakarta
Penanggungjawab : Abdullah Taman, M.Si., Ak.
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : PENGHITUNGAN BIAYA SATUAN PENDIDIKAN SMA NEGERI 2 YOGYAKARTA TAHUN AJARAN 2014/2015

Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
Waktu : 10 September 2015 s/d 10 Desember 2015
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberikan Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kesetabilan pemerintahan dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut diatas

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintahan setempat dapat memberikan bantuan seperlunya

Tanda Tangan
Pemegang Izin

ANASTASIA IDE
CAHYANINGRUM

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 10-9-2015
An. Kepala Dinas Perizinan
Sekretaris

Dinas Perizinan
Drs. HARDONO
NIP. K195804101985031013

Tembusan Kepada :

- Yth 1.Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
2.Ka. Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY
3.Ka. Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta
4.Kepala SMA Negeri 2 Yogyakarta
5.Ybs.